

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
BERSAMA MASYARAKAT (PHBM) SEBAGAI
UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN
MASYARAKAT DESA HUTAN**

**(Studi pada Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Podang Wilis,
Desa Durenan Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**JESTIKA ORLANDA WIYONOPUTRI
105030101111070**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2014**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT (PHBM) SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DESA HUTAN**

(Studi pada Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Podang Wilis Desa Durenan Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun)

Disusun Oleh : Jestika Orlanda Wiyonoputri

NIM : 105030101111070

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi : -



Malang, Juni 2014

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota

Prof. Dr. Abdul Hakim, M.Si

19610202 198503 1 006

Dr. Suryadi, MS

19601103 198703 1 003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 15 Juli 2014
Jam : 10.00
Skripsi atas nama : Jestika Orlanda Wiyonoputri
Judul : Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa Hutan (Studi Pada Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Podang Wilis Desa Durenan Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun)

Dan dinyatakan lulus

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Prof. Dr. Abdul Hakim, M.Si
NIP. 19610202 198503 1 006

Anggota

Dr. Suryadi, MS
NIP. 19601103 198703 1 003

Ketua

Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si
NIP. 19530807 197903 2 001

Anggota

Drs. Suwondo, M.S
NIP. 19530201 198010 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat2 dan pasal 70)

Malang, Juni 2014



Jestika Orlanda Wiyonoputri
10503010111070

RINGKASAN

Jestika Orlanda Wiyonoputri, 2014. **Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa Hutan (Studi Pada Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Podang Wilis Desa Durenan Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun).** Ketua Pembimbing Prof. Dr. Abdul Hakim, M.Si, Anggota Pembimbing Dr. Suryadi, MS. 119 Hal + xiii

Penelitian ini bertitik tolak pada permasalahan pokok yaitu bagaimana pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, serta faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pemberdayaan masyarakat melalui program PHBM yang ada di Desa Durenan Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai pelaksanaan pemberdayaan masyarakat serta faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa Durenan Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh suatu gambaran bahwa pemberdayaan masyarakat melalui program PHBM di Desa Durenan telah berjalan dengan baik. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan telah memberikan dampak yang positif bagi masyarakat desa hutan baik dalam bidang ekonomi maupun sosial. Faktor-faktor yang mendukung dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui program PHBM secara umum adalah kekompakan antara masyarakat desa hutan, LMDH Podang Wilis, dan stakeholder sehingga seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik, potensi alam yang terdapat di Desa Durenan juga mendukung kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Durenan. Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui program PHBM adalah rendahnya kualitas sumberdaya manusia (SDM) masyarakat Desa Durenan yang masih rendah serta masuknya rentenir atau pemilik modal dengan sistem gadai yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan temuan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui program PHBM di Desa Durenan telah berjalan dengan baik. Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan masyarakat, LMDH Podang Wilis dan pihak-pihak terkait telah memberikan dampak pada peningkatan pendapatan masyarakat desa hutan walaupun masih terdapat beberapa faktor penghambat yang cukup berpengaruh pada keberhasilan kegiatan pemberdayaan. Saran yang dapat dikemukakan dalam skripsi ini yaitu : perlunya sosialisasi yang lebih mendalam kepada masyarakat desa hutan Durenan mengingat kualitas SDM yang masih rendah, memberikan informasi kepada masyarakat mengenai program PHBM serta apa saja kegiatan yang ada di dalamnya, dan perlu adanya tindakan khusus untuk mengatasi ulah rentenir atau pemilik modal yang menggunakan sistem gadai yang merugikan masyarakat. Sosialisasi terhadap masyarakat juga perlu digalakkan dalam permasalahan ini untuk membangun pola pikir masyarakat yang lebih mempertimbangkan dampak dari sistem gadai yang merugikan mereka

SUMMARY

Jestika Orlanda Wiyonoputri, 2014. **Community Empowerment through the forest management with the community (PHBM) to increase the income of the villagers who live around the forest** (Study on The Institution Of Village Community Forest (LMDH) Podang Wilis Durenan village, sub-district Gemarang district of Madiun). Chairman of the Advisor, Prof. Dr. Abdul Hakim, M.Si, Supervising Member of Dr. Suryadi, MS. 119 page + xiii

This research focused on basic problems such as the community empowerment, as well as the pro- and inhibitors factor in human resources as the PHBM in Durenan village, sub-district Gemarang, district of Madiun. The purpose of this research is to find out and describe the implementation of community empowerment as well as the factors that supports and inhibited the implementation of community empowerment in Durenan village. This research uses descriptive research methods with qualitative approaches.

Based on the results of the reseach, it has been obtained a picture of that community empowerment through the program of PHBM in the Durenan village has gone well. Community empowerment activities which have been conducted have provided a positive impact for the community the village around the forests, both in economic and social fields. Factors that support in the implementation of community empowerment through programs in General are PHBM cohesiveness among the villagers, the LMDH Podang Wilis and stakeholders so that the whole community empowerment activities can be run properly. The potential of nature which is contained in the village of Durenan also supports the community empowerment activities in the Durenan village. However, the barrier that slows the implementation of community empowerment through PHBM is the poor quality of the human resources in Durenan village. As a result, the influx of moneylenders or owners of capital pawn systems could easily inhibit the growth of the economy of the community.

In conclusion, the implementation of community empowerment through the PHBM program in the Durenan village has gone well. Activities that have been made public, the LMDH Podang Wilis and related parties have given positive impact on people's income, creates more forest villages, eventhough there are still some factors restricting adequate influence on the success of the activities of empowerment. The advice can be presented in this thesis are the need for a more in-depth introduction to the community for villagers who live surrounds the forest area in considering the quality of human resources, provide information to the public about the programs and the activities of the PHBM, last but not least the need of special realization to overcome the act of debt-collectors, who devised a system of pledge which is injurious to the villagers. Socialization of the village community also need to given continuously to build a barrier on the issue of this mindset of the villagers who live around the forest to consider the positive impact of the system of a pledge that eventually harm them.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan kasih karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT (PHBM) SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DESA HUTAN (Studi Pada Lemabaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Podang Wilis, Desa Durenan Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun)** yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemebrdayaan masyarakat melalui program PHBM di Desa Durenan sebagai upaya peningkatan pendapatan masyarakat desa hutan.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si., selaku ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Prof. Dr. Abdul Hakim, M.Si., selaku dosen pembimbing 1 dan Bapak Dr. Suryadi, M.S., selaku dosen pembimbing 2 saya. Beliau telah

menginspirasi saya untuk dapat berbuat yang terbaik dalam disiplin ilmu yang saya tekuni, dan telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen Pengajar Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Berawijaya Malang.
6. Orang tua penyusun yang telah memberikan doa yang tulus, dorongan dan dukungan serta kasih sayang yang selalu melimpah.
7. Teman-teman seperjuangan Ilmu Administrasi Publik 2010.

Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Juni 2014

Jestika Orlanda Wiyonoputri



DAFTAR ISI

	Hlm
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kontribusi Penelitian	10
E. Sistematika Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	13
A. Pembangunan	13
1. Definisi Pembangunan	13
2. Paradigma Pembangunan	15
3. Pembangunan Desa	18
B. Kemiskinan	25
1. Definisi Kemiskinan	25
2. Faktor Penyebab Kemiskinan dan Indikator Kemiskinan	26
C. Pemberdayaan Masyarakat	29
1. Definisi Pemberdayaan Masyarakat	29
2. Strategi Pemberdayaan Masyarakat	32
3. Pihak-pihak yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat	34
D. Hutan	37
1. Pengelolaan Hutan di Indonesia	37
2. Masyarakat Desa Hutan	40
3. Konsep Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
A. Jenis Penelitian	45
B. Fokus penelitian	45
C. Lokasi dan Situs Penelitian	47
D. Jenis dan Sumber data	47
E. Teknik Pengumpulan Data	49
F. Analisis Data	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Gambaran Umum Lokasi Dan Situs Penelitian	52
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52
2. Gambaran Umum Situs Penelitian	59
B. Penyajian data	70
1. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program PHBM Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa Hutan	70
a. Proses Pemberdayaan masyarakat melalui program PHBM sebagai upaya peningkatan pendapatan masyarakat desa hutan	70
b. Aktor-aktor yang terlibat dalam Pemberdayaan masyarakat melalui program PHBM sebagai upaya peningkatan pendapatan masyarakat desa hutan	81
c. Capaian hasil dari Pemberdayaan masyarakat melalui program PHBM sebagai upaya peningkatan pendapatan masyarakat desa hutan	86
2. Faktor pendukung dan penghambat Pemberdayaan masyarakat melalui program PHBM sebagai upaya peningkatan pendapatan masyarakat desa hutan	92
a. Faktor pendukung	92
b. Faktor penghambat	94
C. Pembahasan	97
1. Pemberdayaan masyarakat melalui program PHBM sebagai upaya peningkatan pendapatan masyarakat desa hutan	97
a. Proses Pemberdayaan masyarakat melalui program PHBM sebagai upaya peningkatan pendapatan masyarakat desa hutan	97
b. Aktor-aktor yang terlibat dalam Pemberdayaan masyarakat melalui program PHBM sebagai upaya peningkatan pendapatan masyarakat desa hutan	103
c. Capaian hasil dari Pemberdayaan masyarakat melalui program PHBM sebagai upaya peningkatan pendapatan masyarakat desa hutan	106
2. Faktor pendukung dan penghambat Pemberdayaan masyarakat melalui program PHBM sebagai upaya peningkatan pendapatan masyarakat desa hutan	109
a. Faktor pendukung	109
b. Faktor penghambat	111
 BAB V PENUTUP	 114
A. Kesimpulan	114
B. Saran	118

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**



DAFTAR TABEL

No.	Judul	Hlm.
1	Luas Wilayah Desa Durenan Menurut Kegunaan.....	53
2	Batas Wilayah Desa Durenan.....	53
3	Jumlah Penduduk Desa Durenan Tahun 2013	54
4	Mata Pencaharian Penduduk Desa Durenan Tahun 2013	55
5	Kualitas Angkatan Kerja Penduduk Desa Durenan Tahun 2013	55
6	Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Durenan Tahun 2013	56
7	Sarana dan Prasarana Pendidikan di Desa Durenan.....	57
8	Data Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa Durenan.....	58
9	Data Jumlah Pengangguran Masyarakat Desa Durenan	58
10	Batas Wilayah Pengelolaan Hutan KPH Saradan	64
11	Luas Hutan Pangkuan KPH Saradan.....	64
12	Bantuan Pemerintah Yang Telah Diterima Oleh LMDH Podang Wilis	84
13	Kegiatan LMDH Yang Bekerjasama Dengan Stakeholder.....	85
14	Data Jumlah Masyarakat yang Melakukan Pinjaman Kepada KMDH Podang Wilis.....	89
15	Kegiatan LMDH Berbasis Lahan Maupun Non Lahan.....	108

DAFTAR GAMBAR/BAGAN

No.	Judul	Hlm.
1	Peta Desa Durenan Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun.....	52
2	Struktur Organisasi LMDH Podang Wilis	63
3	Kegiatan Rapat Anggota LMDH Podang Wilis.....	72
4	Kegiatan Pembuatan Tepung Mocaf	76
5	Kegiatan Ternak Bebek Pinjaman Modal Usaha dari KMDH Podang Wilis	77
6	Kegiatan Ternak Kambing Pinjaman dari KMDH Podang Wilis.....	78
7	Pemanfaatan Lahan di Bawah Tegakan	79
8	Kegiatan Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Kurang Mampu di Desa Durenan.....	79
9	Kegiatan RSH (Rumah Sayur Hijau).....	80
10	Poster Seni Karawitan LMDH Podang Wilis.....	81
11	Pola Kerjasama dalam PHBM	82
12	Jalan Beton Yang Dibangun Oleh KMDH Podang Wilis di Desa Durenan	88
13	Rata-Rata Pendapatan Masyarakat Desa Durenan Tahun 2012.....	91

DAFTAR LAMPIRAN

- | No. | Judul |
|-----|------------------|
| 1. | Curriculum Vitae |
| 2. | Interview Guide |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang dikaruniai sumberdaya alam yang melimpah dan kaya akan nilai dan manfaat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Letak Indonesia yang berada pada garis khatulistiwa membuat bergamnya sumberdaya alam yang dimiliki oleh Indonesia. Seperti sumber daya laut, hutan, tambang dan masih banyak lagi yang memiliki nilai yang sangat besar.

Sumberdaya alam yang dimiliki oleh Indonesia harus diatur dan dijaga agar dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat. Aturan tersebut terkandung dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 yang menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Berdasarkan bunyi ayat tersebut menyatakan bahwa negara memiliki hak sepenuhnya atas segala sumberdaya alam yang terdapat di NKRI yang dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat.

Sebagian besar luas wilayah daratan Indonesia dengan hutan. Hal ini ditandai dengan luas wilayah Indonesia yaitu 750 juta hektar dengan luas daratan 193 juta hektar (24,7%). Dari luas daratan tersebut, Indonesia memiliki hutan seluas 143,9 juta hektar. Luas hutan Indonesia mencapai angka 75% dari luas daratan yang dimiliki oleh Indonesia. Indonesia berada



pada daerah tropik sehingga hutan yang ada di Indonesia merupakan hutan tropik. (Indriyanto, 2008:2).

Kerusakan hutan di Indonesia semakin parah setiap tahunnya, laju kerusakan hutan di Indonesia saat ini cukup tinggi dibanding negara-negara lain. Laju deforestasi hutan Indonesia mencapai 610.375,92 Ha per tahun dan tercatat sebagai tiga terbesar di dunia. Padahal hutan adalah bagian dari ekosistem yang mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia (Peryansyah, 2013).

Hutan Indonesia memerlukan pengelolaan yang baik mengingat luas hutan Indonesia yang sangat besar. Perlu adanya pengelolaan khusus yang menerapkan aspek otonomi daerah yang bertujuan agar pengelolaan hutan di setiap wilayah dapat terfokus. Sehingga manfaat hutan dapat dicapai dengan maksimal untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Berbagai permasalahan nasional yang dihadapi saat ini terkait pengelolaan hutan yang telah diakomodasikan dalam Renstra Kementerian Kehutanan 2010-2014. Persoalan tata batas kawasan hutan, baik batas luar maupun batas fungsi, implementasi unit pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), tingginya gangguan keamanan hutan baik terhadap kawasan maupun hasil-hasilnya termasuk ancaman kebakaran hutan dan lahan. Belum optimalnya pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata alam guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi jasa hutan, kesenjangan antara *supply* dan *demand* bahan baku industri kehutanan khususnya kayu yang belum secara optimal disediakan dari hutan tanaman industri dan hutan rakyat.

Masih rendahnya efisiensi produksi industri hasil hutan, hasil hutan bukan kayu (HHBK) serta produk dari hutan rakyat dan hutan kemasyarakatan secara struktur belum secara nyata mendorong pengembangan atau pemberdayaan perekonomian masyarakat (Bambang Hendroyono, 2013).

Persoalan kehutan di Indonesia perlu di benahi melalui pengelolaan hutan yang baik dan benar. Di Indonesia pengelolaan terhadap hutan di wilayah Jawa dan Madura diselenggarakan dan dilaksanakan oleh Perusahaan Umum (Perum) Perhutani. Dasar Hukum Perum Perhutani sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani, 2014). Permasalahan yang selalu dihadapi oleh Perhutani dalam pengelolaan hutan salah satunya adalah kerusakan hutan yang disebabkan oleh pencurian kayu. Tingkat kerusakan hutan akibat pencurian kayu ini, disinyalir oleh Menteri Kehutanan akibat adanya kemiskinan masyarakat pedesaan disekitar hutan sehingga untuk mengurangi tingkat kerusakan hutan harus diupayakan pengurangan kemiskinan, salah satunya dengan cara melibatkan masyarakat desa hutan dalam pengelolaan hutan. Memberdayakan masyarakat desa hutan bertujuan memberikan daya kepada masyarakat untuk ikut memanfaatkan sumberdaya hutan sehingga menciptakan rasa kepedulian masyarakat terhadap kelestarian hutan (Hanani *et al.*, 2003:203).

Akar permasalahan dari pencurian kayu adalah kemiskinan yang dialami oleh masyarakat sekitar hutan. Perlu adanya program Pengelolaan hutan yang mampu mengatasi kemiskinan yang ada dalam masyarakat sekitar

hutan. Melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan dan keterpihakan terhadap kepentingan hutan merupakan cara yang efektif untuk menjaga kelestarian hutan.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka Perum Perhutani membentuk sebuah program yaitu Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Melalui program PHBM Perum Perhutani bersama Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan pihak-pihak yang berkepentingan bekerja sama untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan. Perum Perhutani bekerjasama dengan lembaga kemasyarakatan dan pihak-pihak berkepentingan mewujudkan pengelolaan hutan yang baik dan mengupayakan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dengan prinsip kemitraan yang saling menguntungkan.

Tujuan dari program PHBM adalah untuk menselaraskan kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan sesuai dengan kegiatan pembangunan wilayah sesuai dengan kondisi dan dinamika sosial masyarakat desa hutan. Program PHBM juga bertujuan untuk meningkatkan usaha-usaha produktif dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat desa hutan. Semua kegiatan dalam pengelolaan hutan diupayakan atau melibatkan LMDH dan atau pihak lain yang berkepentingan. (Biro Kelola SDH Perum Perhutani Unit II Jawa Timur, 2010:2)

Soemarno (2006:33), menyatakan bahwa peran masyarakat dalam pengelolaan hutan sangat penting, sasarannya adalah meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berperan-serta dalam pengelolaan sumberdaya hutan dan

lingkungan hidup serta terbentuknya kelompok – kelompok masyarakat yang peduli terhadap pelestarian hutan dan lingkungan hidup. Kegiatan yang diutamakan adalah:

“(1) pengembangan sumberdaya manusia di bidang kehutanan dan lingkungan hidup; (2) pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan dan lingkungan hidup; (3) peningkatan peran serta kelembagaan masyarakat; (4) perlindungan hak-hak tradisional dalam pengelolaan hutan dan lingkungan hidup”.

Masyarakat desa hutan memiliki interaksi langsung terhadap hutan dan sumberdayanya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat yang tinggal di kawasan hutan memang bergantung kepada sumberdaya hutan. Program PHBM melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya, oleh karena itu diperlukan suatu pengelolaan yang sistematis dan terstruktur sehingga program PHBM dapat terlaksana. Masyarakat memerlukan lembaga yang mampu merepresentasikan kepentingannya sehingga dalam pemanfaatan sumberdaya hutan dapat berjalan dengan baik dan benar. Lembaga tersebut adalah Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang berfungsi menjadi payung bagi masyarakat desa hutan dan menjadi lembaga yang memberdayakan masyarakat agar dapat memanfaatkan sumber daya hutan dengan baik.

Menurut Awang, *et al.*, (2008:13) “LMDH adalah satu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa yang berada didalam atau disekitar hutan untuk mengatur dan memenuhi kebutuhannya melalui interaksi terhadap hutan dalam konteks sosial, ekonomi, politik dan budaya”. LMDH bersama masyarakat bekerjasama dengan Perum Perhutani melalui program PHBM

untuk membantu masyarakat agar lebih bijak dalam memanfaatkan sumberdaya hutan. Melalui PHBM diharapkan masyarakat desa hutan mampu mengetahui dan melaksanakan program-program pengelolaan hutan yang baik serta saling menguntungkan. Bersama dengan Perhutani, LMDH, dan pihak yang berkepentingan masyarakat akan diberdayakan untuk dapat memanfaatkan dan mengelola sumberdaya hutan dengan baik dan saling menguntungkan.

Pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan dalam program PHBM karena tujuan dari program tersebut tidak saja untuk kelestarian hutan melainkan juga mengajak masyarakat untuk mampu berpartisipasi dan menghasilkan usaha-usaha produktif sehingga tercipta pembangunan berkelanjutan. Proses pemberdayaan masyarakat lebih menekankan aspek ekonomi dibandingkan aspek politik, sedangkan strategi yang tepat adalah memberikan masyarakat sarana agar mampu mengembangkan diri, dalam pemberdayaan masyarakat peran NGO (*nongovernmental organization*) juga sangat penting dan berpengaruh. (Yansen, 2013:134).

Desa Durenan merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun. Pemberdayaan masyarakat sangat dibutuhkan oleh masyarakat Desa Durenan yang terletak di daerah pegunungan Gunung Wilis yang daerahnya sangat terpencil dan terbelakang jauh dari sarana dan prasarana sebagai penunjang kehidupan. Sebagian besar masyarakat desa durenan menggantungkan hidupnya pada hasil perkebunan yang mereka miliki seperti mangga, durian, alpokat, jengkol dan lain-lain.

Hasil perkebunan yang dimiliki masyarakat desa hutan Durenan hanya bisa di panen setiap tahun, sehingga masyarakat tidak bisa memperoleh penghasilan setiap hari ataupun setiap bulannya. Permasalahan yang lain adalah 80% masyarakat Desa Durenan menggadaikan aset mereka yaitu berupa hasil panennya kepada rentenir atau pemilik modal. Hal ini sangat menghambat perekonomian masyarakat karena masyarakat tidak bisa menikmati hasil panen perkebunan mereka karena sistem gadai yang mereka lakukan kepada pemilik modal. Masyarakat Desa Durenan tidak bisa menikmati hasil panen mereka sebelum hutan tersebut dapat dilunasi. Masyarakat membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melunasi hutang mereka dengan cepat karena mereka tidak bisa memperoleh pendapatan dari hasil panen perkebunan mereka sendiri (Wawancara dengan Bapak Purnomo Ketua LMDH Podang Wilis Tanggal 4 April 2014).

Berdirinya LMDH Podang Wilis dan KMDH Podang Wilis diharapkan mampu mengatasi permasalahan tersebut. Sosialisasi awal yang dilakukan oleh pihak LMDH Podang Wilis terhadap masyarakat dilakukan dari 'pintu ke pintu' untuk menjelaskan tentang program PHBM. LMDH Podang Wilis menyebarkan banyak informasi kepada pihak luar yang mau membantu mengatasi kondisi masyarakat yang sulit tersebut.

Upaya pengentasan kemiskinan dan pemecahan permasalahan gadai yang dialami oleh masyarakat Desa Durenan dilakukan melalui berbagai kegiatan pemberdayaan melalui program PHBM berupa kegiatan lahan maupun non lahan. Masyarakat dilibatkan dalam kegiatan pengelolaan hutan

seperti pemanfaatan lahan di bawah tegakan untuk ditanami tanaman pertanian dan juga banyak kegiatan usaha produktif seperti pembuatan kripik singkong, tepung mocaf dan lain-lain. Seluruh kegiatan tersebut dilakukan oleh masyarakat Desa Durenan bersama dengan LMDH Podang Wilis, Perhutani, Pemerintah Desa dan pihak yang berkepentingan melaksanakan kegiatan pemberdayaan melalui sistem kemitraan yang saling menguntungkan. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui program PHBM ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan kemiskinan dengan menciptakan kegiatan-kegiatan yang dapat menambah pendapatan masyarakat desa hutan di Desa Durenan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti tentang pemberdayaan masyarakat melalui program PHBM di Desa Durenan. Penulis dalam penelitian ini mengambil judul :
“PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT (PHBM) SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DESA HUTAN (STUDI PADA LMDH PODANG WILIS, DESA DURENAN KECAMATAN GEMARANG KABUPATEN MADIUN)”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat disusun rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa Hutan di Desa Durenan, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun?
2. Apa sajakah faktor pendukung faktor dan penghambat dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa Hutan di Desa Durenan, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

3. Untuk Mengetahui dan Mendeskripsikan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa Hutan Di Desa Durenan, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun.
4. Untuk Mengetahui dan Mendeskripsikan Faktor Pendukung Dan Penghambat Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa Hutan Di Desa Durenan, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun.

D. Kontribusi Penelitian

1. Kegunaan Akademis

- a. Sebagai salah satu bahan kajian bagi ilmu Administrasi terutama tentang pengelolaan hutan bersama masyarakat.
- b. Sebagai masukan untuk penelitian – penelitian selanjutnya yang mempunyai tema yang sama atau hampir sama dengan penelitian ini.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Instansi yang bersangkutan
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi dan motivasi bagi instansi yang bersangkutan dalam pemberdayaan masyarakat melalui program PHBM.

- b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memacu kesadaran masyarakat untuk turut serta dalam pengelolaan hutan.

E. Sistematika Penelitian

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima (5) bab yang merupakan rangkaian antar bab yang satu dengan yang lainnya. Adapun penulisan sistematika ini adalah sebagai berikut :

BAB I :PENDAHULUAN Merupakan bab yang meliputi penjelasan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II :KAJIAN PUSTAKA Merupakan bab yang terdiri dari teori-teori yang akan digunakan sebagai dasar dalam mengevaluasi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian, yaitu Pembangunan, Kemiskinan, Pemberdayaan Masyarakat, Hutan.

BAB III :METODOLOGI PENELITIAN Menjelaskan tentang metodologi penelitian yang digunakan menyangkut jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisis data.

BAB IV :PEMBAHASAN Menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan yang memuat gambaran lokasi penelitian, penyajian data dan pembahasan.

BAB V :PENUTUP Merupakan bab yang berisi kesimpulan dari hasil dan pembahasan, serta saran yang merupakan rekomendasi tentang studi lanjutan atau kebijakan-kebijakan yang akan datang.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. PEMBANGUNAN

1. Definisi Pembangunan

Pembangunan mempunyai makna yang saling berhubungan antara suatu tujuan dan pencapain yang sifatnya terus-menerus. Pembangunan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk merubah suatu kondisi agar mencapai suatu keadaan yang lebih baik dari sebelumnya. Pembangunan memerlukan gotong-royong dan kerjasama antara berbagai pihak agar pembangunan berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Menurut Tjokroamidjojo (1994:222) berpendapat bahwa “pembangunan merupakan proses pembaharuan yang kontinue dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang dianggap baik”.

Sedangkan Siagian (1985:2) mengemukakan pendapatnya tentang pembangunan, yaitu “pembangunan merupakan usaha atau rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju kepada modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*National building*)”. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan suatu proses yang dilakukan secara terus-menerus atau berkelanjutan untuk melakukan pembaharuan yang bertujuan untuk melakukan pertumbuhan diberbagai segi kehidupan bangsa untuk menuju suatu kondisi yang lebih baik.

Pendapat beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan upaya yang dilakukan untuk melakukan perubahan dan pertumbuhan untuk mencapai suatu keadaan yang lebih baik. perubahan dan pertumbuhan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan mengembangkan kemampuannya sendiri melalui hubungan yang saling menguntungkan. Pembangunan ini dilakukan secara sadar dan terarah yang sifatnya terus-menerus sesuai dengan tujuan yang telah disepakati bersama.

2. Paradigma Pembangunan

Pembangunan dalam suatu Negara dipengaruhi oleh paradigma yang dipakai dalam negara tersebut, paradigma pembangunan suatu Negara menentukan fokus pembangunan apa yang akan mereka lakukan. Yansen (2013:118) meberikan penjelasan mengenai paradigma pembangunan yang terdiri dari beberapa paradigma, yaitu:

1. Paradigma pembangunan sebagai pertumbuhan ekonomi
Paradigma ini sering disebut sebagai Teori Pertumbuhan Ekonomi (*Economic Growth Theory*), yang berpandangan bahwa pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
2. Paradigma Pemerataan
Dalam upaya pembangunan, kebijakan sosial ekonomi harus seimbang dan terpadu. Tingkat pertumbuhan yang tinggi tetap diyakini dapat mendorong pencapaian tujuan-tujuan sosial, misalnya penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, namun harus didukung oleh peningkatan sumberdaya manusia, keseimbangan pembangunan antar daerah, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta pengendalian pertumbuhan penduduk.

3. Paradigma pembangunan manusia
Paradigma pembangunan manusia menekankan pada fungsi manusia sebagai aktor pembangunan (*actor-oriented*), pada *community based* atau *people centered development*.
4. Paradigma pemberdayaan masyarakat
Dasar pandangan dari paradigma ini adalah bahwa upaya yang dilakukan harus diarahkan langsung pada akar persoalannya, yaitu peningkatan kemampuan rakyat.

Pembangunan merupakan suatu proses dimana suatu negara berupaya untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dari berbagai definisi dan uraian tentang pembangunan dapat ditarik sebuah garis kesimpulan bahwa arah dari pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pembangunan merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam suatu negara yang bersifat berkelanjutan yang bertujuan untuk mencapai suatu kesejahteraan ekonomi yang lebih baik.

Ukuran yang paling mudah ketika mengukur suatu keberhasilan pembangunan adalah ekonomi. Sehingga muncul banyak teori pembangunan yang mengangkat ekonomi sebagai tolok ukur dalam pembangunan. Untuk mencapai kemakmuran perlu adanya upaya yang bertujuan untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat.

Terdapat lima tahapan pembangunan ekonomi yang dikemukakan oleh W.W. Rostow dalam Yansen (2013:119) bahwa suatu negara dalam proses pembangunan ekonominya akan melalui lima tahapan, yaitu :

- 1) Masyarakat tradisional, suatu kondisi masyarakat yang hanya sedikit terjadi perubahan sosial
- 2) Prakondisi tinggal landas, suatu tahapan yang ditandai oleh munculnya para usahawan, terjadi perluasan pasar, dan pembangunan industri

- 3) Tahapan lepas landas, yang ditandai oleh adanya pertumbuhan ekonomi, dan upaya untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi secara otonom dan berkelanjutan (*self sustained economic growth*)
- 4) Tahap kematangan pertumbuhan, yaitu suatu tahapan dimana pertumbuhan ekonomi sudah berlangsung secara otonom dan berkesinambungan
- 5) Tahapan konsumsi massa tinggi, yaitu suatu tahapan yang ditandai oleh pesatnya perluasan kesempatan kerja, pendapatan nasional meningkat, permintaan konsumen meningkat, dan terjadi pembentukan pasar domestik yang tangguh.

Sebagaimana disebutkan diatas bahwa ekonomi merupakan suatu tolok ukur yang paling mudah dalam menilai suatu keberhasilan pembangunan. Tahapan pembangunan ekonomi di atas merupakan peta konsep perubahan keadaan suatu masyarakat di mana dalam setiap tahap terjadi pertumbuhan dari sektor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tersebut yang merupakan tujuan pembangunan yaitu untuk mensejahterakan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

3. Pembangunan Desa

Pembangunan dalam suatu negara tidak hanya berpusat pada pembangunan perkotaan saja, tetapi juga harus menjangkau sampai kepada pedesaan. Pengertian desa menurut Bintaro dalam Yansen (2013:195) bahwa “desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, dan kultur yang terdapat ditempat itu (suatu daerah), dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain”. Selanjutnya Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan pengertian desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Seorang ahli Sosiologi Talcot Parson dalam Yansen (2013:202) menggambarkan masyarakat desa sebagai masyarakat tradisional (*gemeinschaft*) yang menganal ciri-ciri sebagai berikut :

- a) Afektivitas
Ada hubungannya dengan perasaan kasih sayang, cinta, kesetiaan dan kemesraan. Perwujudannya dalam sikap dan perbuatan tolong-menolong, menyatakan simpati terhadap musibah yang diderita orang lain dan menolongnya tanpa pamrih.
- b) Orientasi Kolektif
Sifat ini merupakan konsekuensi dari Afektivitas, yaitu mereka mementingkan kebersamaan, tidak suka menonjolkan diri, tidak suka akan orang yang berbeda pendapat, intinya semua harus memperlihatkan keseragaman persamaan.
- c) Partikularisme
Pada dasarnya adalah semua hal yang ada hubungannya dengan keberlakuan khusus suatu tempat atau daerah tertentu. Perasaan subyektif, perasaan kebersamaan sesungguhnya yang hanya berlaku untuk kelompok tertentu saja.
- d) Askripsi
Yaitu berhubungan dengan mutu atau sifat khusus yang tidak diperoleh berdasarkan suatu usaha yang tidak disengaja, tetapi merupakan suatu keadaan yang sudah merupakan kebiasaan atau keturunan.
- e) Kekabaran (*diffuseness*)
Sesuatu yang tidak jelas terutama dalam hubungan antara pribadi tanpa ketegasan. Masyarakat desa menggunakan bahasa tidak langsung, untuk menunjukkan sesuatu. Dari uraian tersebut dapat terlihat pada desa-desa yang masih murni masyarakatnya tanpa pengaruh dari luar.

Definisi diatas menggambarkan suatu masyarakat yang terdapat pada suatu wilayah yang memiliki hubungan satu dengan yang lain dalam suatu kesatuan wilayah tersebut. Masyarakat desa menjunjung tinggi hal-hal tradisional yang telah menjadi budaya yang mereka pertahankan dan

membangun hubungan satu sama lain melalui adat istiadat tersebut. oleh karena itu unsur-unsur desa memiliki kaitan satu dengan yang lain dalam bidang sosial budaya dan ekonomi.

Hakekat dari konsep pembangunan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk melakukan perubahan yang bertujuan untuk mencapai suatu keadaan atau tingkat yang lebih baik. Pembangunan desa memerlukan kerjasama yang baik dari berbagai pihak agar tujuan pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik. Pelibatan masyarakat dalam pembangunan desa sangat diperlukan mengingat sulitnya merubah budaya masyarakat desa yang akan menghambat jalannya pembangunan di pedesaan.

Menurut Siagian (1983:80) “pembangunan masyarakat desa adalah proses di mana masyarakat desa mau menerima usaha-usaha pembaharuan dalam rangka meningkatkan taraf hidup mereka”. Pembangunan pedesaan perlu diupayakan dan dioptimalkan mengingat desa merupakan komponen penting dalam suatu negara berkembang. Perekonomian dan tingkat kesejahteraan yang kokoh akan menciptakan suatu kemandirian bagi masyarakatnya dan berpengaruh bagi perekonomian negara.

Abdul Wahab dalam Yansen (2013:219) menjelaskan bahwa kebijaksanaan pembangunan pedesaan yang diterapkan oleh negara-negara yang sedang berkembang. Paling tidak tercakup dalam empat jenis strategi yang dipergunakan oleh negara, yaitu :

1. *The Growth Strategy* (strategi pertumbuhan)

Strategi pertumbuhan pada umumnya dimaksudkan untuk mencapai peningkatan yang cepat dalam nilai ekonomis melalui peningkatan pendapatan perkapita penduduk, produktivitas sektor

prtanian, permodalan, kesempatan kerja dan peningkatan kemampuan konsumsi masyarakat pedesaan (Adisasmita, 2013:76).

2. *The Welfare Strategy* (strategi kesejahteraan)

Dimaksudkan untuk memperbaiki taraf hidup atau kesejahteraan penduduk daerah pedesaan melalui program-program yang beskala besar seperti pendirian klinik-klinik kesehatan dan pusat-pusat perbaikan pendapatan di pedesaan.

3. *The Responsive Strategy* (strategi yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat)

Strategi ini bermaksud menanggapi kebutuhan-kebutuhan yang telah dirumuskan sendiri oleh penduduk desa. Selain itu juga dimaksudkan untuk membantu memperlancar usaha-usaha mandiri yang dilakukan oleh penduduk pedesaan melalui pengadaan teknologi serta sumber-sumber yang cocok untuk kebutuhan mereka.

Ketiga strategi pembangunan diatas memiliki kelemahan-kelemahan masing-masing. Strategi pertumbuhan, cenderung memperlebar jurang kaya dan miskin di pedesaan. Strategi kesejahteraan, menciptakan ketergantungan masyarakat pada pemerintah dalam sumber-sumber yang mereka butuhkan jelas akan melampaui pemerintah untuk memenuhinya. Sementara itu strategi yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat terlalu idealistik, sulit direalisasikan secara luas. Untuk dapat keluar dari permasalahan kelemahan ketiga strategi diatas maka muncul suatu strategi baru yang menyangkut tujuan ketiga strategi diatas. Strategi tersebut adalah strategi terpadu dan menyeluruh.

4. *The Integrated or Holistic Strategy* (strategi terpadu dan strategi menyeluruh)

Strategi ini sangat berbeda dengan ketiga strategi sebelumnya, fungsi-fungsi yang dijalankan jauh beraneka ragam dan kompleks secara teoritikal. Secara konsepsional terdapat tiga prinsip yang membedakan strategi ini dengan ketiga strategi sebelumnya, yaitu :

- 1) Persamaan keadilan dan partisipasi merupakan tujuan-tujuan yang eksplisit dari strategi menyeluruh. Badan-badan publik (dinas-dinas pemerintah) yang ditugaskan haruslah memahami dinamika sosial dan masyarakat yang dipekerjakan sebagai basis untuk merancang intervensinya itu harus dilakukan sedemikian rupa sehingga kian memperkokoh kemampuan masyarakat sendiri untuk memecahkan masalah yang dihadapi, serta untuk mengambil langkah-langkah instrumental politik. Dengan demikian yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk melakukan intervensi sosial dari aparatur pemerintah.
- 2) Perlunya perubahan-perubahan mendasar baik dalam komitmen maupun gaya dan cara kerja dari badan-badan

publik yang belum memiliki intervensi sosial akan memerlukan pemimpin yang kuat komitmen pribadinya, yakni: (a) menyetel arah nilai-nilai organisasi, energi dan proses-proses menuju kearah yang dituju yaitu strategi yang menyeluruh; (b) memelihara integritas organisasi ketika harus menghadapi kekuatan-kekuatan politik yang menentang. Jadi yang dibutuhkan ialah kepemimpinan kelembagaan (*institutional leadership*).

- 3) Adanya pedoman yang dirancang khusus untuk memfungsikan struktur-struktur organisasi yang bertugas antara lain: (a) membangun dan memelihara perspektif menyeluruh (holistik); (b) melaksanakan rekrutmen dan pengembangan pemimpin-pemimpin kelembagaan; (c) membangun mekanisme untuk mengatur saling keterkaitan diantar organisasi-organisasi serta untuk mengatur konflik. Dengan demikian yang dibutuhkan adalah sistem manajemen.

Dengan memperhatikan pendapat tersebut diatas, dapat di pahami bahwa masyarakat pedesaan memerlukan ruang dan kesempatan untuk dapat mengembangkan diri dan melakukan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhannya. Memberdayakan masyarakat dan memberikan ruang untuk masyarakat tersebut agar dapat mengupayakan dan menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam masyarakat itu sendiri. Membentuk kelompok-kelompok atau lembaga-lembaga lokal yang mampu mengayomi masyarakat dan memberikan solusi dalam pembangunan desa. Dalam hal ini intervensi pemerintah harus diminimalkan agar masyarakat dapat menentukan sendiri pilihan pembangunan yang mereka butuhkan. Sehingga tercipta pembangunan yang berkelanjutan karena masyarakat memiliki keahlian yang didapat dari pemberdayaan masyarakat yang telah diberikan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri.

Beberapa macam pendekatan yang telah digunakan dalam pembangunan pedesaan. Sebagai upaya dalam pembangunan pedesaan yang baik dan terarah atau tepat sasaran. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan *natural resources based* (berbasis pemberdayaan alam) melalui penyediaan infrastruktur untuk mendukung pengembangan kegiatan agrobisnis dan kerajinan/industri kecil, serta pembangunan kelembagaan untuk memperkuat penerapan teknologi serta pemanfaatan sumberdaya alam. Pendekatan kedua adalah mempercepat perbaikan dalam perekonomian pedesaan, melalui perencanaan tata ruang (spasial), baik aspek fisik maupun aspek sosial ekonomi, yang diharapkan dapat menciptakan pemerataan pertumbuhan daerah khususnya desa-desa yang terbelakang. Pendekatan yang ketiga adalah perencanaan partisipasi masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat perlu diperhatikan dalam pembangunan, masyarakat diharapkan ikut berperan lebih aktif dan produktif dalam memberikan kontribusinya. Membuka ruang partisipasi dan melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat perlu dilakukan agar program pembangunan yang akan dilakukan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pendekatan perencanaan partisipatif dibutuhkan dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan kontribusi dari anggota masyarakat lokal. Meningkatkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dibutuhkan kepemimpinan lokal (*local leadership*) yang aspiratif ke bawah dan berwawasan ke depan pada pembangunan berkelanjutan serta sosialisasi,

pendampingan dan penguatan kelembagaan perdesaan (ekonomi dan sosial) (Adisasmita, 2013:13).

Lebih lanjut menurut Adisasmita (2013:71) terdapat beberapa kebijaksanaan yang akan ditempuh untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan yaitu :

- 1) Penciptaan iklim yang mendorong prakarsa dan peran serta dunia usaha dan masyarakat pada umumnya dalam berbagai kegiatan pembangunan.
- 2) Peningkatan kualitas dan kemampuan masyarakat dalam berbagai bidang kegiatan sehingga dapat bekerja secara lebih berdaya guna dan berhasil guna dengan daya saing serta nilai tambah yang meningkat.
- 3) Peningkatan hubungan antara kelompok usaha kecil, menengah dan besar.

Pembangunan pedesaan membutuhkan pendekatan yang bertahap dan mampu mengarahkan suatu desa dan masyarakatnya dengan konsep pembangunan yang sesuai dengan potensinya tanpa merusak kondisi fisik desa dan budaya serta adat istiadat yang ada di desa tersebut. pedesaan cenderung memiliki nilai lebih dalam dalam sumber daya alam yang dimiliki desa tersebut, sehingga arah pembangunan akan lebih efektif ketika masyarakat di ajak untuk memanfaatkan potensi alam yang ada di desa tersebut. pembangunan melalui pengembangan potensi sumber daya alam harus di dukung dengan adanya perbaikan dan pengembangan infrastruktur, tata ruang, dan aspek fisik lainnya yang dapat mendukung pengembangan potensi sumber daya alam dipedesaan.

Pendekatan yang selanjutnya adalah perencanaan partisipasi masyarakat di mana masyarakat desa di beri ruang untuk dapat memberikan

partisipasinya dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan desa. Kegiatan partisipasi masyarakat ini harus didukung oleh pemerintah, organisasi kemasyarakatan lokal, dan pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan desa. Partisipasi masyarakat diperlukan agar masyarakat dapat mengembangkan potensinya dan menciptakan masyarakat yang berdaya guna dan mandiri sehingga tercipta pembangunan yang berkelanjutan.

B. Kemiskinan

1. Definisi Kemiskinan

Pengertian kemiskinan sangat beragam, yaitu mulai dari suatu keadaan yang tidak berdaya, kekurangan, ataupun tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan secara berkecukupan. *United Nation Development Program* (UNDP) dalam Yansen (2013:93) mendefinisikan “kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memperluas pilihan-pilihan hidup, antara lain dengan memasukan penilaian tidak adanya partisipasi dalam pengambilan keputusan publik”. Lebih lanjut Priyatno dan Arsyad dalam Yansen (2013:93) menyatakan bahwa :

“kemiskinan itu bersifat multidimensional, mengingat kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan itu memiliki banyak aspek, baik aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi sosial dan politik, pengetahuan dan ketrampilan dan sasarannya, maupun sekunder berupa miskin akan jaringan sosial, sumber keuangan dan informasi”.

Kondisi kemiskinan adalah salah satu kriteria penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Apabila suatu bangsa telah

berhasil tumbuh kemakmurannya namun kemiskinan masih terus-menerus dirasakan oleh sebagian penduduknya maka tentulah sulit mengatakan bahwa pembangunan di suatu negara tersebut telah berhasil. Oleh karena itu banyak sekali suatu definisi dan ukuran yang dipakai untuk mengukur suatu kemiskinan (Mubyarto, 1996:9)

Kemiskinan tidak hanya mencakup dalam bidang ekonomi saja melainkan mengandung banyak aspek pula didalamnya. Beberapa pendapat para ahli diatas masih belum menunjukkan suatu kesamaan pendapat, hal ini disebabkan oleh latar belakang dan pengalam empiris para ahli tidak sama. Namun terdapat pula kesamaan pendapat mengenai kemiskinan yang menunjukkan adanya kelaamanan yang dialami seseorang atau kelompok dalam bidang sosial, ekonomi yang menyebabkan ketidakmampuan seseorang atau kelompok.

2. Faktor penyebab kemiskinan dan indikator kemiskinan

Kemiskinan yang terjadi pada suatu kelompok atau individu dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang bermacam-macam latar belakang kelompok atau individu tersebut. Terdapat banyak ukuran yang dapat dipakai dalam menilai suatu kemiskinan yang berbeda-beda sehingga suatu kelompok atau individu dikatan miskin tergantung pada faktor dan macamnya. Sumodiningrat (2006:5) membagi faktor-faktor penyebab kemiskinan menjadi dua, yaitu :

1. Kemiskinan terjadi disebabkan oleh faktor internal adalah ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari,

ketidakmampuan dalam menampilkan peranan sosial dan ketidakmampuan dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang dihadapinya

2. Faktor eksternal atau faktor yang ada di luar jangkauan individu. Faktor ini secara konkrit lebih bersifat hambatan, kelembangaan atau struktur masyarakat yang bisa menghambat seseorang untuk meraih kesempatannya. Seperti: kebijakan publik yang belum berpihak kepada penduduk miskin, tidak tersedianya pelayanan sosial dasar, tidak dilindunginya hak atas kepemilikan tanah, terbatasnya lapangan pekerjaan, kesenjangan dan ketidakadilan sosial, serta dampak pembangunan yang berorientasi kapitalis.

Pendapat lain dikemukakan oleh oleh David Cox dalam Yansen (2013:104) yang membagi penyebab kemiskinan dalam beberapa dimensi, yaitu :

- a. Kemiskinan yang diakibatkan oleh globalisasi. Globalisasi menghasilkan pemenang dan yang kalah. Pemenang umumnya adalah negara-negara maju. Sedangkan negara-negara berkembang seringkali semakin terpinggirkan oleh persaingan dan pasar bebas, yang merupakan prasyarat globalisasi.
- b. Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Kemiskinan sub sistem (kemiskinan akibat rendahnya pembangunan), kemiskinan pedesaan (kemiskinan akibat peminggiran pedesaan dalam proses pembangunan), kemiskinan perkotaan (kemiskinan yang diakibatkan oleh hakekat dan kecepatan pertumbuhan perkotaan).
- c. Kemiskinan sosial. Kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak dan kelompok minoritas.
- d. Kemiskinan konsekuensial. Kemiskinan yang terjadi akibat kejadian-kejadian lain atau faktor-faktor eksternal diluar si miskin, seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan dan tingginya jumlah penduduk.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan sangatlah beragam, faktor-faktor tersebut menyebabkan suatu kelompok atau individu mengalami keterbatasan untuk memenuhi kebutuhannya baik jasmani maupun rohani. Kemiskinan yang dialami oleh suatu kelompok atau individu dapat

digolongkan sesuai dengan latar belakang dan keterbatasan yang dimilikinya. Indikator suatu kemiskinan tidak hanya sebatas ketidakmampuan mencukupi kebutuhan pokok saja tetapi juga dalam aspek lainnya seperti keterbatasan lingkungan sosial, keterbatasan partisipasi publik, dan lain sebagainya sehingga kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh aspek ekonomi saja tetapi juga aspek lainnya seperti sosial, politik dan budaya.

C. Pemberdayaan Masyarakat

1. Definisi Pemberdayaan Masyarakat

Pertumbuhan masyarakat yang sangat cepat menyebabkan berbagai ketimpangan yang menuntut pemerintah untuk dapat segera mengatasinya. Dalam mencapai tujuan pembangunan, pemerintah dituntut untuk selalu melakukan berbagai inovasi yang mampu menjawab segala kebutuhan masyarakat. Pemberdayaan dibutuhkan agar masyarakat lebih berkembang, mandiri dan dapat memanfaatkan sumberdaya yang ada di sekitarnya. Yansen (2013:130) memberikan pendapatnya mengenai pemberdayaan, yaitu: “pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk mengembangkan potensi daya yang sudah ada, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya”.

Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses yang dilakukan dalam mencapai tujuannya memperoleh

kekuatan atau kemampuan dalam suatu pembangunan tertentu di mana suatu individu atau kelompok berada dalam keadaan tidak berdaya. Paradigma pemberdayaan muncul atas suatu kesadaran bahwa masalah utama dalam proses pembangunan adalah masyarakat dalam hal kemampuan dan kesempatan untuk memanfaatkan peluang yang terbuka dalam proses pembangunan (Yansen, 2013:127). Dalam penerapannya proses pemberdayaan harus dilakukan secara sistematis dan terarah, serta menggunakan metode dan proses yang sudah disepakati bersama oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Diharapkan dengan adanya pemberdayaan ini masyarakat dapat mandiri dan mampu mengembangkan potensinya.

Ada beberapa konsep pemberdayaan masyarakat dari sudut pandang dari para ahli antara lain:

Samuel Paul dalam Soemarno (2006:82) memberikan pendapatnya mengenai pemberdayaan masyarakat, yaitu: “pemberdayaan masyarakat adalah pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan pembangunan”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan peluang kepada masyarakat dengan cara partisipasi dan pembinaan untuk dapat mengembangkan potensinya serta mampu memanfaatkan sumberdaya yang ada disekitarnya. Fokus utama dari pemberdayaan masyarakat adalah pembangunan yang dilakukan dengan cara memberikan prioritas kepada

masyarakat untuk memperoleh ruang agar dapat mengembangkan dan menggali potensinya, melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan untuk dapat meningkatkan kemampuan ekonomi, dan memberikan pembinaan kepada masyarakat yang sifatnya berkelanjutan agar masyarakat dapat mandiri serta dapat terus mengembangkannya.

Dalam mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat pemerintah perlu melakukan berbagai proses dan upaya yang signifikan. Hal ini diperlukan agar pemberdayaan yang akan diberikan kepada masyarakat mampu diserap dengan mudah dan sesuai dengan kebutuhannya. Konsep pemberdayaan sebaiknya bersifat membangun dan mendorong masyarakat, serta bersifat berkelanjutan agar masyarakat tidak cenderung ketergantungan terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah melainkan mampu untuk belajar agar dapat mandiri. Upaya tersebut adalah suatu bentuk usaha yang dilakukan pemerintah agar terdapat suatu batas yang jelas dalam melakukan kegiatan pemberdayaan.

2. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan masyarakat adalah menekankan kepada upaya yang dilakukan agar masyarakat dapat mendapatkan ruang untuk membangun sumberdaya ekonomi yang lebih baik, kebebasan mengemukakan pendapat dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dalam pembangunan daerahnya, serta berorganisasi. Sumberdaya lokal namun bukan berarti mengabaikan unsur-unsur lain yang berada di luar kelompok masyarakat,

bukan hanya ekonomi tetapi juga politik, agar masyarakat mendapatkan posisi yang seimbang dalam pengambilan keputusan. Kemudian juga terdapat pendapat lain bahwa dalam proses pemberdayaan lebih menekankan aspek ekonomi dibandingkan aspek politik. Sehingga strategi yang paling tepat adalah dengan memberikan masyarakat berupa sarana agar mampu dan dapat mengembangkan diri. NGO (*nongovernmental organization*) dapat membantu dalam pemberdayaan dalam kaitannya membentuk kelompok mandiri dan bersinergi (Friedmann. 1992: Schumacher. 1973 dalam Yansen, 2013:133).

Menurut Soemarno (2006:458) strategi kebijakan umum yang perlu diambil dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu:

- 1) Mengembangkan kelembagaan sosial yang dapat memfasilitasi masyarakat untuk memperoleh dan memanfaatkan sumberdaya yang berasal dari alam, pemerintah dan dari masyarakat sendiri, untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, martabat dan keberadaannya; serta memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik.
- 2) Mengembangkan kapasitas organisasi ekonomi masyarakat untuk dapat mengelola kegiatan usaha ekonomi secara kompetitif dan menguntungkan yang dapat memberikan lapangan kerja dan pendapatan yang layak.
- 3) Mengembangkan lembaga keswadayaan untuk membangun solidaritas dan ketahanan sosial masyarakat.

Kemudian menurut Elliot dalam Yansen (2013:134), bahwa strategi pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu:

- a. *The Welfare Approach*; pendekatan ini mengarah pada pendekatan manusia dan bukan untuk memberdaya masyarakat dalam menghadapi proses politik dan pemiskinan rakyat.
- b. *The Development Approach*; pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan proyek pembangunan untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian dan keswadayaan masyarakat.
- c. *The Empowerment Approach*; pendekatan yang melihat bahwa kemiskinan sebagai akibat dari proses politik dan berusaha untuk

memberdayakan atau melatih rakyat untuk mengatasi ketidakberdayaan masyarakat.

Dari pendapat diatas dapat dikatakan strategi dalam pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk menswadayakan dan menggali potensi masyarakat agar dapat mandiri untuk mebangun ekonomi yang lebih baik dan terlepas dari keterbelakangan dan kemiskinan. Melalui pemberdayaan partisipasi masyarakat akan meningkat sehingga dapat ikut serta dalam pengambilan keputusan. Pemberdayaan masyarakat juga dapat menciptakan sinergi yang harmonis antara masyarakat, kelembagaan lokal, dan institusi yang berkaitan sehingga tercipta pembangunan yang berkelanjutan.

3. Pihak-pihak yang Terlibat dalam Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat membutuhkan suatu sinergi yang kuat dari masing-masing pihak yang terlibat dalam upaya pembangunan tersebut. Negara memiliki peran yang penting dalam pemberdayaan masyarakat. Dalam konsep negara kesejahteraan (Welfare State), menjelaskan bahwa negara di bentuk untuk mensejahterakan masyarakatnya. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang dilakukan negara untuk mensejahterakan masyarakatnya, namun konsep ini dirasa kurang berhasil karena menimbulkan ketergantungan karena campur tangan negara yang terlalu besar (Suhendra, 2006:121).

Dalam konsep Good Governance (keperintahan yang baik) memberikan kesetaraan yang sejajar antara pemerintah, masyarakat, maupun sektor pengusaha. Pemerintah lebih berfungsi sebagai regulator yang

mengakomodasi aspirasi masyarakat. Pemerintah lebih berperan sebagai pengarah, dunia usaha dan masyarakatlah yang melaksanakan program pembangunan. Dengan berbagai regulasi pemerintah dapat menciptakan situasi yang kondusif untuk pembangunan di seluruh sektor kehidupan. Pemerintah hanya sebagai fasilitator dalam penyaluran aspirasi dan menetapkan arah dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat agar tujuan pembangunan dapat dijalankan. Pemerintah tetap menjadi pengarah dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat pemberdayaan masyarakat namun pemeran utamanya adalah masyarakat itu sendiri (Suhendra, 2006:122).

Menurut Yansen (2013:175) pemberdayaan masyarakat harus melibatkan segenap potensi yang ada dalam masyarakat. Beberapa aspek diantaranya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Peranan pemerintah, birokrasi pemerintah harus dapat menyesuaikan dengan misi pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini upaya yang harus dilakukan adalah:
 - a) Birokrasi harus memahami aspirasi rakyat dan harus peka terhadap masalah yang dihadapi oleh rakyat;
 - b) Birokrasi harus membangun aspirasi masyarakat. Artinya, berilah sebanyak-banyaknya kepercayaan pada rakyat untuk memperbaiki dirinya sendiri. Aparat pemerintah membantu memecahkan masalah yang tidak dapat diatasi oleh masyarakat sendiri;
 - c) Untuk itu maka birokrasi harus menyiapkan masyarakat dengan sebaiknya, baik pengetahuannya maupun cara bekerjanya, agar upaya pemberdayaan masyarakat dapat efektif.
 - d) Birokrasi harus membuka dialog dengan masyarakat.
 - e) Birokrasi harus membuka akses yang diperlukan oleh masyarakat yang tidak dapat diperolehnya sendiri.
 - f) Birokrasi harus menciptakan instrumen peraturan dan pengaturan mekanisme pasar yang memihak golongan masyarakat yang lemah.

2. Organisasi-organisasi kemasyarakatan di luar lingkungan masyarakat sendiri. Di sini yang mempunyai potensi berperan besar adalah lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM), disamping organisasi-organisasi kemasyarakatan yang bersifat nasional dan lokal.
3. Lembaga masyarakat yang tumbuh dari dan di dalam masyarakat itu sendiri, atau sering disebut sebagai *local community organization*. Lembaga ini dapat bersifat semi formal seperti LKMD,PKK, atau yang benar-benar tumbuh dari masyarakat sendiri.
4. Koperasi. Koperasi dapat merupakan wahana yang efektif bagi upaya pemberdayaan masyarakat, dengan membangun manusia modern namun dengan dasar-dasar kekeluargaan dan kegotongroyongan yang menjadi ciri demokrasi Indonesia.
5. Pendamping. Diperlukan pendamping untuk membimbing penduduk miskin dalam upaya memperbaiki kesejahteraannya. Pendamping bertugas menyertai proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok masyarakat sebagai fasilitator, komunikator, ataupun dinamisor.
6. Masyarakat yang lebih mampu, khususnya dunia usaha dan swasta. Pemberdayaan masyarakat dapat lebih optimal jika terjadi keterkaitan dalam kemitraan usaha diantar yang telah mampu dengan yang masih tertinggal terutama melalui penyediaan modal usaha untuk pengembangan usaha penduduk miskin.

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan daya agar masyarakat lebih produktif dan berdaya guna. Diperlukan sinergi yang baik di mana setiap pihak-pihak yang bersangkutan dalam perencanaan pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat ini dapat secara terencana dalam melakukan fungsinya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan pihak-pihak lain dalam pelaksanaannya walaupun masyarakat merupakan komponen utama namun masyarakat tidak bisa melakukan pembangunan sendiri akan tetapi memerlukan pihak-pihak lain. Peran pemerintah sebagai regulator dan organisasi-organisasi yang bisa mengayomi masyarakat sehingga proses pemberdayaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan bersama.

D. Hutan

1. Pengelolaan Hutan di Indonesia

Hutan adalah salah satu sumberdaya terbesar yang dimiliki oleh Indonesia. Menurut Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan “hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan”.

Hutan merupakan sumberdaya yang memberikan banyak sekali manfaat bagi kehidupan manusia. Dalam pemanfaatannya manusia harus selalu memperhatikan kelestariannya sebab jika tidak dijaga akan menimbulkan banyak sekali kerugian termasuk bencana alam.

Ditinjau dari maknanya menurut Arifin (2001:93) menyatakan bahwa “pengelolaan merupakan suatu usaha yang di dalamnya meliputi beberapa aspek seperti perencanaan, organisasi pelaksanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi yang berfungsi saling berkaitan dan merupakan suatu kesatuan yang saling mempengaruhi”. Berdasarkan pendapat diatas pengelolaan hutan merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mengelola kelestarian dan mengolah sumberdaya hutan agar dapat memberikan manfaatnya semaksimal mungkin namun tetap memperhatikan aspek lingkungan dan sumberdaya hutan itu sendiri.

Dalam pengelolaan hutan memerlukan sinergi yang saling menguntungkan dari beberapa pihak dan bekerjasama untuk melaksanakan kegiatan suatu program pengelolaan hutan. Menurut Hanani, *et al.*, (2003:189)

menyatakan bahwa manajemen pengelolaan hutan terdapat tiga pihak terkait, yaitu:

- a. Perum Perhutani. Pihak pengelola hutan yakni Perhutani berkeinginan untuk meningkatkan efisiensi usahanya serta tetap terjaga kelestariannya baik secara alami maupun terjaga dari pencurian oleh masyarakat di sekitar hutan.
- b. Masyarakat di sekitar hutan. Dari sisi masyarakat sekitar hutan adanya hutan mempunyai harapan untuk tumpuan mencari pekerjaan sehingga mampu memperbaiki keadaan sosial ekonominya.
- c. Pemerintah daerah. Dari sisi pemerintah daerah mempunyai harapan agar pengelolaan hutan berdampak terhadap pembangunan pedesaan di kawasan hutan.

Selanjutnya Hanani *et al.*, (2003:193) juga menyatakan bahwa karena Semakin beragamnya perkembangan zaman membuat tantangan pengelolaan hutan semakin beragam pula. Usaha untuk mengembangkan hutan pada masa datang mendapat tantangan sejalan dengan tuntutan dunia internasional dan perubahan paradigma masyarakat. Tantangan tersebut meliputi beberapa isu strategis yang berpengaruh terhadap pengembangan hutan yakni:

- 1) Efisiensi pengelolaan hutan dan kelestarian sumberdaya (isu lingkungan)
Efisiensi pengelolaan hutan merupakan usaha pemanfaatan hutan agar secara ekonomis untung sementara kelestariannya tetap terjaga. Efisiensi ini dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti model penebangan yang baik, pemilihan kayu berkualitas, cepat dapat dimanfaatkan, serta tidak membiarkan areal hutan gundul apalagi tidak dimanfaatkan.
- 2) Tuntutan otonomi daerah (isu pemerintahan)
Otonomi daerah merupakan peluang sekaligus ancaman serius bagi pengembangan hutan saat ini. Dengan adanya otonomi daerah pengawasan dan pemanfaatan hutan dapat lebih mudah dilakukan dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Namun, dalam beberapa bagian otonomi daerah akan memutuskan pola pengembangan hutan yang terintegrasi dalam kawasan dan bukan wilayah administratif. Kondisi

ini menyebabkan pengelolaan hutan cenderung parsial tentu saja hal ini akan mempersulit koordinasi dalam pengelolaan hutan.

- 3) Tuntutan pemberdayaan masyarakat (isu pemerataan keadilan)
Tuntutan pemberdayaan masyarakat merupakan hal penting dalam pengembangan hutan. Pemberdayaan merupakan usaha untuk memberikan kekuatan kepada pihak yang terlibat dalam hutan agar dapat ikut serta melestarikannya.

Pengelolaan hutan di Indonesia membutuhkan konsep yang terencana dengan baik agar dalam kegiatan pengelolaan hutan dapat membawa dampak yang baik tanpa mengganggu ekosistem yang sudah ada. Pengelolaan hutan di Indonesia harus dapat memanfaatkan sumber daya hutan dengan baik tanpa mengganggu kelestarian hutan. Pemberdayaan masyarakat juga memerlukan konsep yang penting dalam pengelolaan hutan, dengan adanya pemberdayaan masyarakat maka masyarakat akan mengembangkan potensinya dan sumber daya hutan yang ada sehingga tercipta pembangunan yang berkelanjutan dan masyarakat yang ikut menjaga kelestarian hutan. Adanya otonomi daerah memudahkan daerah untuk dapat menggali potensinya sendiri di mana daerah dapat melakukan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya hutan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dengan cepat dan lebih terarah.

2. Masyarakat Desa Hutan

Masyarakat desa hutan adalah masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Masyarakat desa hutan memiliki interaksi yang saling berhubungan dengan hutan baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor: 682/KPTS/DIR/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat, pengertian

Masyarakat Desa Hutan (MDH) adalah sebagai berikut : “Masyarakat Desa Hutan (MDH) adalah kelompok orang yang bertempat tinggal di desa hutan dan melakukan kegiatan yang berinteraksi dengan sumberdaya hutan untuk mendukung kehidupannya”. Masyarakat desa hutan memiliki ketergantungan terhadap hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik kebutuhan secara primer maupun sekunder.

Masyarakat desa hutan merupakan pihak yang perlu diperhatikan kesejahteraannya karena sebagian besar memanfaatkan sumberdaya hutan untuk mendapatkan pengasilan dan ikut menjaga kelestarian hutan.

Hutan merupakan sumber penuh kebutuhan bagi masyarakat desa hutan, melihat begitu pentingnya hutan bagi kehidupan masyarakat tersebut diperlukan suatu upaya yang bertujuan untuk membuat masyarakat desa hutan mamapu memanfaatkan sumberdaya hutan dengan baik sebagai pemenuh kebutuhannya sehari-hari. Dalam pemanfaatan hutan harus pula melihat aspek-aspek yang tetap harus dijaga seperti kelestarian hutan serta pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan sehingga tidak mengganggu ekosistem hutan.

3. Konsep Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan

Pemberdayaan merupakan usaha untuk memberikan daya atau kekuatan kepada pihak yang terlibat untuk dapat ikut serta dalam pengelolaan hutan. Menurut Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor: 682/KPTS/DIR/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan

Bersama Masyarakat, pengertian pemberdayaan masyarakat desa hutan adalah :

“Pemberdayaan masyarakat desa hutan adalah tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas masyarakat desa hutan mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memehuni kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimiliki”.

Dalam manajemen pengelolaan hutan ada tiga pihak yang terkait, yakni pihak perum perhutani, pemerintah daerah, serta masyarakat sekitar hutan. Sehingga yang menjadi permasalahan dalam kajian ini adalah bagaimana menyusun suatu model pengelolaan hutan yang bersifat kemitraan yang mampu menjawab tantangan paradigma baru, yaitu: efisiensi pengelolaan dan kelestarian sumberdaya dengan lebih memberdayakan masyarakat sekitar hutan sekaligus berdampak pada pembangunan wilayah di sekitar hutan. Konsep pengelolaan tersebut sering di sebut sebagai agroforestry (Hanani, *et al.*, 2003:194)

Agroforestry atau model pengelolaan hutan dengan melibatkan masyarakat hutan, seperti yang diungkapkan oleh Achlil dalam Hanani, *et al.*, (2003:195) yang mengemukakan bahwa:

“agroforestry adalah suatu bentuk usahatani dalam rangka pengelolaan hutan serbaguna yang menyasikan antara kepentingan produksi dan kepentingan pelestarian, berupa pengusahaan secara bersama atau secara berurutan jenis-jenis tanaman pertanian atau lapangan penggembalaan dengan jenis-jenis tanaman kehutanan pada suatu lahan hutan.”

Lebih lanjut ada tiga manfaat sistem agroforestry menurut Ombo Satjaradja dalam Hanani, *et al.*, (2003:195), yaitu:

1. Dalam bentuk agroforestry didapat tanaman yang tidak homogen dan tidak seumur yang terdiri dari dua strata atau lebih. Dengan bentuk pola tanam demikian, tajuk tegakan dapat menutup tanah, terhindar dari erosi dan produktivitas tanah dapat dipertahankan.
2. Para petani yang bermukim di sekitar hutan dapat mengolah lahan dengan tanaman palawija dan hijauan makanan ternak disamping menanam komoditi utama (pohon) kehutanan. Dengan demikian sistem agroforestry dapat memperluas kesempatan dan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar hutan.
3. Dengan melaksanakan sistem agroforestry, akan didapat bentuk hutan serbaguna atau usahatani terpadu di luar kawasan hutan yang dapat memenuhi kebutuhan majemuk seperti kayu pertukangan; bahan pangan; madu, obat-obatan, hijauan makanan ternak dan lingkungan hidup yang sehat serta kebutuhan lain yang mendesak dari penduduk. Dengan demikian dapat meningkatkan produktivitas lahan dan ekonomi pedesaan.

Mosher dalam Soemarno (2006:201) mengemukakan bahwa secara teoritis pembangunan masyarakat pedesaan di sekitar hutan, merupakan sub sistem dari pembangunan desa. Kegiatan yang harus ditangani, yaitu:

- 1) Program yang berkaitan dengan pertanian meliputi :
 - a. Penyediaan pasar untuk memasarkan hasil produksi pertanian,
 - b. Penyediaan fasilitas pelayanan kebutuhan sarana produksi pertanian,
 - c. Penyediaan fasilitas kredit pertanian,
 - d. Pengadaan percobaan-percobaan lokal (*verification trials*),
 - e. Pengadaan jalan, untuk fasilitas transport dari wilayah usaha tani;
- 2) Program yang berkaitan dengan kegiatan di luar sektor pertanian, meliputi;
 - a. Pengembangan industri pedesaan,
 - b. Penyediaan fasilitas kesehatan,
 - c. Pelayanan masalah Keluarga Berencana,
 - d. Penyediaan saran dan prasarana pendidikan,
 - e. Penyediaan fasilitas kegiatan keagamaan,
 - f. Kegiatan penyuluhan tentang keluarga sejahtera,
 - g. Penyediaan fasilitas yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat.

Melalui pemberdayaan dan pembangunan desa di sekitar hutan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan desa di sekitar hutan. Melalui

pertanian yang dikembangkan dan diberdayakan maka diharapkan akan tercipta masyarakat yang mandiri dalam memanfaatkan sumberdaya hutan yang akan menciptakan pembangunan pedesaan di sekitar hutan. Pemberdayaan masyarakat desa hutan akan meningkatkan potensi sosial ekonomi masyarakat dan pembangunan pedesaan.

Pemberdayaan masyarakat desan hutan merupakan suatu upaya yang ditempuh untuk memberikan kekuasaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan sumberdaya hutan. Hutan merupakan sumber pemenuh kebutuhan bagi masyarakat desa hutan, melihat begitu pentingnya hutan bagi kehidupan masyarakat tersebut diperlukan suatu upaya yang bertujuan untuk membuat masyarakat desa hutan mampu memanfaatkan sumberdaya hutan dengan baik sebagai pemenuh kebutuhannya sehari-hari. Dalam pemanfaatan hutan harus pula melihat aspek-aspek yang tetap harus dijaga seperti kelestarian hutan serta pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan sehingga tidak mengganggu ekosistem hutan.

Pengelolaan hutan memerlukan kerja sama dari berbagai pihak yang terkait dengan kehidupan hutan. Sehingga diperlukan suatu program dimana dalam pengelolaannya ada beberapa keuntungan yang bisa didapat oleh pihak yang berperan serta dalam program tersebut. Pengelolaan hutan berbasis pemberdayaan masyarakat dalam bentuk kemitraan dari beberapa pihak, yaitu: Perum Perhutani, masyarakat desa hutan, dan pemerintah daerah dinilai merupakan suatu gagasan yang efektif dalam pengelolaan hutan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Bodan dan Taylor dalam Moleong (2005:4) mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena dengan penelitian ini diharapkan akan dapat mengetahui pelaksanaan pengelolaan hutan berbasis pemberdayaan masyarakat dan kendalanya melalui program pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) di Desa Klangon Kecamatan Saradan.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu lingkup atau wilayah permasalahan yang akan diteliti. Fokus penelitian harus terlebih dahulu ditetapkan untuk dapat menentukan arah penelitian dan membatasi bidang penelitian. Sehingga permasalahan penelitian tidak terlalu meluas dan untuk menghindari pengumpulan data yang tidak diperlukan. Fokus penelitian diperlukan agar peneliti dapat menentukan fokus permasalahan yang akan diteliti yang sesuai

dengan tujuan dan permasalahan yang akan diteliti. Dengan adanya fokus penelitian, peneliti dapat mengetahui data mana yang yang perlu dikumpulkan yang sesuai dengan tujuan dan permasalahan yang telah ditentukan. Sehingga penelitian yang dilakukan lebih terarah dan tidak meluas sehingga tidak membuang waktu dan tenaga secara percuma karena penelitian dilakukan dengan fokus yang sudah ditetapkan terlebih dahulu.

Adapun yang menjadi fokus penelitian adalah :

1. Pemberdayaan masyarakat melalui program PHBM sebagai upaya peningkatan pendapatan masyarakat desa hutan di Desa Durenan Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun
 - a. Proses pemberdayaan masyarakat melalui program PHBM sebagai upaya peningkatan pendapatan masyarakat desa hutan
 - b. Aktor-aktor yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat melalui program PHBM sebagai upaya peningkatan pendapatan masyarakat desa hutan
 - c. Capaian hasil dalam pemberdayaan masyarakat melalui program PHBM sebagai upaya peningkatan pendapatan masyarakat desa hutan
2. Faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan masyarakat melalui program PHBM sebagai upaya peningkatan pendapatan masyarakat desa hutan di Desa Durenan Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian. Berdasarkan lokasi penelitian ini diharapkan peneliti akan mendapatkan data dan informasi yang sesuai dengan masalah penelitian. Lokasi penelitian ini adalah Desa Durenan, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun. Desa Durenan merupakan Desa yang terletak di daerah pegunungan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pemberdayaan masyarakat yang ada di desa tersebut mengingat lokasi desa tersebut jauh dari infrastruktur yang memadai.

Situs penelitian merupakan tempat dimana peneliti dapat melihat atau menangkap keadaan dari objek yang diteliti, sehingga keakuratan data yang diperlukan dapat diperoleh. Dalam hal ini yang menjadi situs penelitian adalah Perum Perhutani KPH Saradan dan LMDH Podang Wilis.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Sesuai dengan jenisnya, data yang diperoleh dapat digolongkan menjadi :

- a) Data primer, yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya, kemudian diamati dan dicatat atau data yang didapat sendiri dari lapangan secara langsung. Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh adalah dari sub seksi PHBM KPH Saradan,

Lemabaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Podang Wilis, Pemerintah Desa Durenan dan masyarakat Desa Durenan.

- b) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti, data yang terlebih dahulu telah dikumpulkan dan diolah oleh orang lain. Data sekunder dapat berupa karya ilmiah, jurnal dan makalah yang terkait dengan masalah penelitian serta dokumen, laporan ataupun catatan yang ada di Kesatuan Pemangku Hutan Saradan, LMDH Podang Wilis dan Pemerintah Desa Durenan.

2. Sumber Data

Yang menjadi sumber data dari penelitian ini adalah :

- a) Informan

Menurut Moleong (2000:90), informan adalah orang dalam yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah : Kepala Sub Seksi PHBM KPH Saradan, Ketua dan Bendahara LMDH Podang Wilis, Pemerintah Desa Durenan, dan Masyarakat Desa Durenan.

- b) Dokumen

Dokumen merupakan sumber data yang diperoleh dari laporan-laporan, catatan-catatan, dan berbagai arsip yang memudahkan bagi proses penelitian. Dokumen yang digunakan

adalah yang relevan dengan masalah dan fokus penelitian.

Dokumen ini diperoleh dari Sub Seksi PHBM KPH Saradan, LMDH Podang Wilis, dan Pemerintah Desa Durenan.

c) Peristiwa

Peristiwa merupakan serangkaian peristiwa atau kegiatan yang terjadi saat terlaksananya program PHBM di Desa Durenan Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mencari dan memperoleh data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1) Interview (wawancara)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada narasumber untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan masalah penelitian dan jawaban dari narasumber tersebut di catat dan di rekam.

Hasil wawancara merupakan data mentah yang kemudian di olah dan di analisis oleh peneliti.

Menurut moleong (2007:187), dalam penelitian ini menggunakan petunjuk umum wawancara. Jenis wawancara ini menggunakan kerangka dan garis besar tentang pokok-pokok pertanyaan yang akan

diajukan peneliti kepada narasumber. Adapun narasumber yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Sub Seksi PHBM dan Binling KPH Saradan
2. Kepala LMDH Podang Wilis
3. Pemerintah Desa Durenan
4. Masyarakat Desa Durenan
5. Pihak-pihak yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat melalui program PHBM di Desa Durenan.

2) Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap segala kegiatan dan peristiwa yang berhubungan dengan masalah penelitian. Observasi yang dilakukan adalah observasi terhadap subyek, perilaku subyek selama wawancara, interaksi subyek dengan peneliti dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara melihat dan mencatat data-data, dokumen-dokumen, laporan maupun arsip yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian yang dilakukan.

F. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan – bahan lain sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2011:244). Analisis data dilakukan dengan mengolah data, memilih mana yang penting dan akan dipelajari secara lebih mendalam dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh orang lain.

Menurut Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman dalam Sugiyono (2011:246), tahap-tahap yang perlu dilalui dalam melakukan analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

- 1) Reduksi data

Data lapangan dipilih dan dirangkum selanjutnya memfokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau pokoknya.

- 2) Penyajian Data

Penyajian data berisi sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis agar data-data tersebut mudah dipahami.

- 3) Penarikan Kesimpulan

Peneliti mengemukakan kesimpulan yang didukung oleh data-data yang valid dan konsisten sehingga kesimpulan tersebut dapat dikatakan sebagai kesimpulan yang berkredibilitas tinggi.

BAB IV

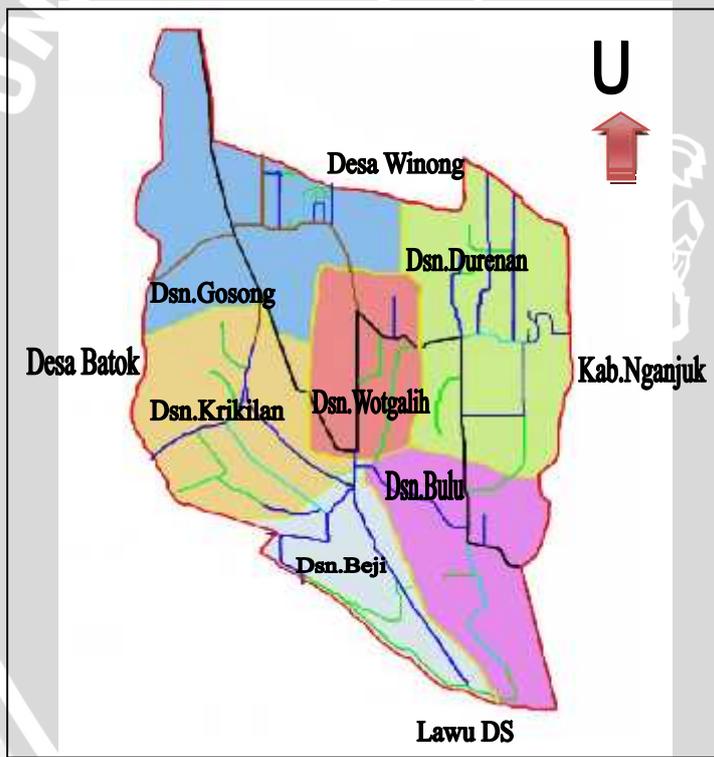
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

(1) Gambaran Umum Desa Durenan

a. Kondisi Geografis dan Administratif Desa Durenan



Gambar 1 Peta Desa Durenan, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun

Sumber : Dokumen Profil Desa Durenan, 2013

Desa Durenan merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun. Desa Durenan memiliki wilayah seluas 822,915 ha/m². Luas wilayah pemukiman seluas 322.065 ha/m², luas pekarangan 444,055 ha/m², luas persawahan 52,95 ha/m², luas kuburan 2,26 ha/m², luas perkantoran 0,35 ha/m² dan luas prasarana umum lainnya 0,62 ha/m². Desa Durenan memiliki rata-rata curah hujan sebesar 179,28 Mm dengan ketinggian 20-1500 meter dari permukaan laut.

Tabel 1

Luas Wilayah Desa Durenan Menurut Penggunaan

NO	Uraian	Luas (ha/m ²)
1	Luas Pemukiman	322,065
2	Luas Persawahan	52,95
3	Luas Perkebunan	0
4	Luas Kuburan	2,26
5	Luas Pekarangan	444,055
6	Luas Taman	0
7	Luas Perkantoran	0,35
8	Luas Prasarana Umum lainnya	0,62
9	Luas Wilayah	822,915

Sumber : Dok. Instrumen Pendataan Profil Desa Durenan, 2013

Secara geografis Desa Durenan berbatasan dengan beberapa desa dan kecamatan. Adapun batas-batas Desa Durenan dibagi menjadi berikut :

Tabel 2

Batas Wilayah Desa Durenan

NO	Uraian	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1	Sebelah Utara	Winong	Gemarang
2	Sebelah Selatan	Lawu DS	Kare
3	Sebelah Timur	Duren	Sawahan, Nganjuk
4	Sebelah Barat	Batok	Gemarang

Sumber : Dok. Instrumen Pendataan Profil Desa Durenan, 2013

Secara Administratif Desa Durenan terbagi menjadi 6 Rukun Warga (RW) dan 43 Rukun Tetangga (RT). Desa Durenan juga terbagi menjadi 6 dusun yaitu Gosong, Krikilan, Wotgalih, Durenan, Beji, dan Bulu.

b. Penduduk dan Jenis Pekerjaan

Jumlah penduduk di Desa Durenan pada tahun 2013 adalah 5.583 jiwa dengan jumlah laki-laki 2.879 jiwa dan perempuan 2.704 jiwa. Jumlah penduduk Desa Durenan pada tahun 2012 adalah 5.306 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 1.844 jiwa. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa Desa Durenan mengalami peningkatan jumlah penduduk yang cukup besar dalam satu tahun.

Tabel 3

Jumlah Penduduk Desa Durenan Tahun 2013

NO	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Laki-laki	2.879
2	Jumlah Perempuan	2.704
3	Jumlah Penduduk	5.583
4	Jumlah Kepala Keluarga	1.884

Sumber : Dok Instrumen Pendataan Profil Desa Durenan,2013

Rata-rata jenis mata pencaharian penduduk Desa Durenan adalah petani. Hal ini ditandai dengan luasnya wilayah pekarangan yang dimiliki oleh Desa Durenan. Berikut ini adalah data profesi penduduk Desa Durenan :

Tabel 4

Mata Pencaharian Penduduk Desa Durenan Tahun 2013

NO	Uraian	Laki-Laki	Perempuan
1	Petani	1324	1170
2	Buruh tani	905	873
3	Buruh migran perempuan	0	6
4	Buruh migran laki-laki	2	0
5	Pegawai negeri sipil	7	4
6	Pedagang keliling	6	16
7	Montir	7	0
8	Pembantu rumah tangga	0	83
9	TNI	1	0
10	POLRI	1	0
11	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	5	0
12	Dukun kampung terlatih	4	1
13	Sopir	51	0
14	Tukang Ojek	15	0
15	Tukang batu/kayu	23	0
	Jumlah mata pencaharian pokok	2351	2153

Sumber : Dok. Instrumen Pendataan Profil Desa Durenan,2013

Rata-rata kualitas angkatan kerja penduduk Desa Durenan adalah usia yang tamat SD. Adapun data kualitas angkatan kerja penduduk Desa Durenan adalah sebagai berikut :

Tabel 5

Kualitas Angkatan Kerja Penduduk Desa Durenan Tahun2013

NO	Uraian	Laki - Laki	Perempuan
1	Penduduk Usia 18-56 tahun yang buta aksara dan huruf/angka latin	97	98
2	Penduduk usia 18-56 Tahun yang tidak tamat SD	164	246

3	Penduduk usia 18-56 Tahun yang tamat SD	1559	1387
4	Penduduk usia 18-56 Tahun yang tamat SLTP	478	442
5	Penduduk usia 18-56 Tahun yang tamat SLTA	137	106
6	Penduduk usia 18-56 Tahun yang tamat Perguruan Tinggi	13	9
	Jumlah	2448	2288

Sumber : Dok Instrumen Pendataan Profil Desa Durenan,2013

c. Kondisi Pendidikan

Rata-rata pendidikan penduduk Desa Durenan di dominasi oleh tamatan SD sederajat. Adapun data tingkat pendidikan penduduk Desa Durenan adalah sebagai berikut :

Tabel 6

Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Durenan Tahun 2013

NO	Uraian	Laki-Laki	Perempuan
1	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	112	85
2	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group	84	79
3	Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	97	98
4	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	423	379
5	Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	274	317
6	Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	164	246
7	Tamatan SD sederajat	1559	1387
8	Jumlah Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTP	927	987
9	Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	766	644

10	Tamatan SLTP sederajat	478	442
11	Tamatan SLTA sederajat	137	106
12	Tamatan S1	13	4
	Jumlah Jenjang Pendidikan Formal	5034	4774

Sumber : Dok. Instrumen Pendataan Profil Desa Durenan, 2013

Sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Desa Durenan terdapat 2 (dua) buah gedung TK, 5 (lima) buah gedung SD dan 1 (satu) buah gedung SLTP yaitu SLTP 2 Gemarang. Sedangkan untuk gedung SLTA di Kecamatan Gemarang terdapat 1 (satu) buah gedung SLTA atau sederajat yaitu SMKN 1 Gemarang yang terdapat di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang. Berikut ini data sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Desa Durenan :

Tabel 7

Sarana dan Prasarana Pendidikan di Desa Durenan

NO	Uraian	Keterangan
1	Gedung SMA/Sederajat	0
2	Gedung SMP/Sederajat	1
3	Gedung SD/Sederajat	5
4	Gedung TK	2

Sumber : Dok. Instrumen Pendataan Profil Desa Durenan, 2013

d. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Durenan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat yang tentunya dipengaruhi oleh jenis mata pencaharian masyarakat Desa Durenan. Tingkat pendidikan dan angka pengangguran juga mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat Desa Durenan. Tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Durenan di dominasi oleh keluarga sejahtera

2. Adapun data tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Durenan adalah sebagai berikut :

Tabel 8
Data Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa Durenan

NO	Uraian	Jumlah (KK)
1	Jumlah keluarga prasejahtera	182
2	Jumlah keluarga sejahtera 1	437
3	Jumlah keluarga sejahtera 2	507
4	Jumlah keluarga sejahtera 3	479
5	Jumlah keluarga sejahtera 3 plus	279

Sumber : Dok. Instrumen Pendataan Profil Desa Durenan Tahun 2013

Kondisi perekonomian masyarakat juga dipengaruhi oleh tingkat pengangguran yang ada dalam masyarakat tersebut. Adapun data jumlah pengangguran penduduk di Desa Durenan adalah sebagai berikut :

Tabel 9
Data Jumlah Pengangguran Masyarakat Desa Durenan

NO	Uraian	Jumlah
1	Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun)	3643
2	Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja	20
3	Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga	1767
4	Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh	1536
5	Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu	925
6	Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja	3
7	Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja	2

Sumber : Dok. Instrumen Pendataan Profil Desa Durenan, 2013

2. Gambaran Umum Situs Penelitian

(1) Gambaran Umum Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)

Podang Wilis

a. Lingkup Wilayah LMDH Podang Wilis

Wilayah kerja LMDH Podang Wilis adalah hutan wengkong LMDH Podang Wilis yang tersebar di sekitar Desa Durenan seluas 60,3 ha dan luas hutan lindung (HL) ± 100 ha yang berada pada lereng gunung tersebar pada wilayah Kerja Perum Perhutani KPH Saradan – BKPH Wilangan Selatan, RPH Sejan. Terdapat berbagai kegiatan yang dilakukan oleh LMDH Podang Wilis yaitu kegiatan yang bersifat intern dan ektern. Kegiatan intern, berupa diskusi berkala sesama pengurus setiap bulan dua kali dan tiap kelompok dusun melakukan pertemuan anggotan tiap 1 bulan sekali. Kegiatan penguatan kelembagaan juga diisi dengan simpan pinjam modal kerja bagi seluruh anggota yang besarnya sesuai dengan kondisi keuangan LMDH. LMDH Podang Wilis juga memiliki Koperasi Masyarakat Desa Hutan (KMDH) Podang Wilis selain itu, pada tanggal 4 juni 2008 LMDH juga membentuk Kelompok Wanita Desa Hutan (KWTH) yang bergerak dalam bidang pemberdayaan perempuan dengan keterampilan dan usaha produktif. Kelompok perempuan ini pada wal pembentukannya bertujuan untuk memberikan aktivitas kepada ibu-ibu petani hutan untuk memperoleh hasil tambahan di luar hutan.

Sedangkan dalam kegiatan ekstern, adalah kegiatan LMDH yang berhubungan dengan pihak luar lebih banyak di isi dengan kerjasama

kegiatan rutin pengelolaan hutan dengan Perum Perhutani KPH Saradan. Setiap tahun secara rutin LMDH mengkoordinir anggota untuk melakukan aktivitas persiapan tanaman, penanaman, pemeliharaan, pengendalian keamanan dan kegiatan tebangan pada wengkon hutan sebagai wujud kontribusi LMDH dalam pengelolaan hutan. Kerjasama dengan Perum Perhutani juga dilakukan dalam bentuk penyediaan pupuk dan bibit tanaman pokok. Saat ini LMDH telah memiliki persemaian yang berfungsi untuk pengkayaan jenis tanaman untuk memenuhi permintaan bibit dari pihak luar dan LMDH Podang Wilis juga melakukan penanaman pada lahan Hutan Lindung yang kondisinya saat ini gundul. Anggota LMDH Podang Wilis berjumlah 1.063 orang yang terdiri dari beberapa desa. (Sumber : Sekertariat LMDH Podang Wilis, 2014)

b. Visi dan Misi LMDH Podang Wilis

Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Podang Wilis memiliki visi dan misi sebagai berikut :

1) Visi LMDH Podang Wilis :

Menciptakan masyarakat desa hutan di Desa Durenan, yang makmu dan sejahtera.

2) Misi LMDH Podang Wilis :

a) Memanfaatkan tanah kosong dengan jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi lahan.

- b) Menghutankan kembali tanah kosong dan mengembalikan hutan sesuai fungsinya dengan mengikutsertakan semua pihak terkait.
- c) Mengoptimalkan lahan di bawah tegakan.
- d) Memelihara dan menjaga hutan secara optimal.
- e) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.
- f) Mengembangkan usaha ekonomi produktif.
- g) Memperluas dan memperkuat jaringan dengan pihak terkait.

c. Tujuan dan Sasaran Pengelolaan Petak Hutan Pangkuan LMDH Podang Wilis

Tujuan LMDH Podang Wilis dalam pengelolaan petak hutan pangkuan Desa Durenan adalah :

- 1) Melindungi dan melestarikan hutan.
- 2) Membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tepian hutan.
- 3) Memayungi masyarakat desa hutan (MDH) dalam mengelola sumberdaya hutan secara lestari dan berkelanjutan.
- 4) Membangun perekonomian berbasis kerakyatan.
- 5) Membangun terciptanya usaha perekonomian di tiap anggota.

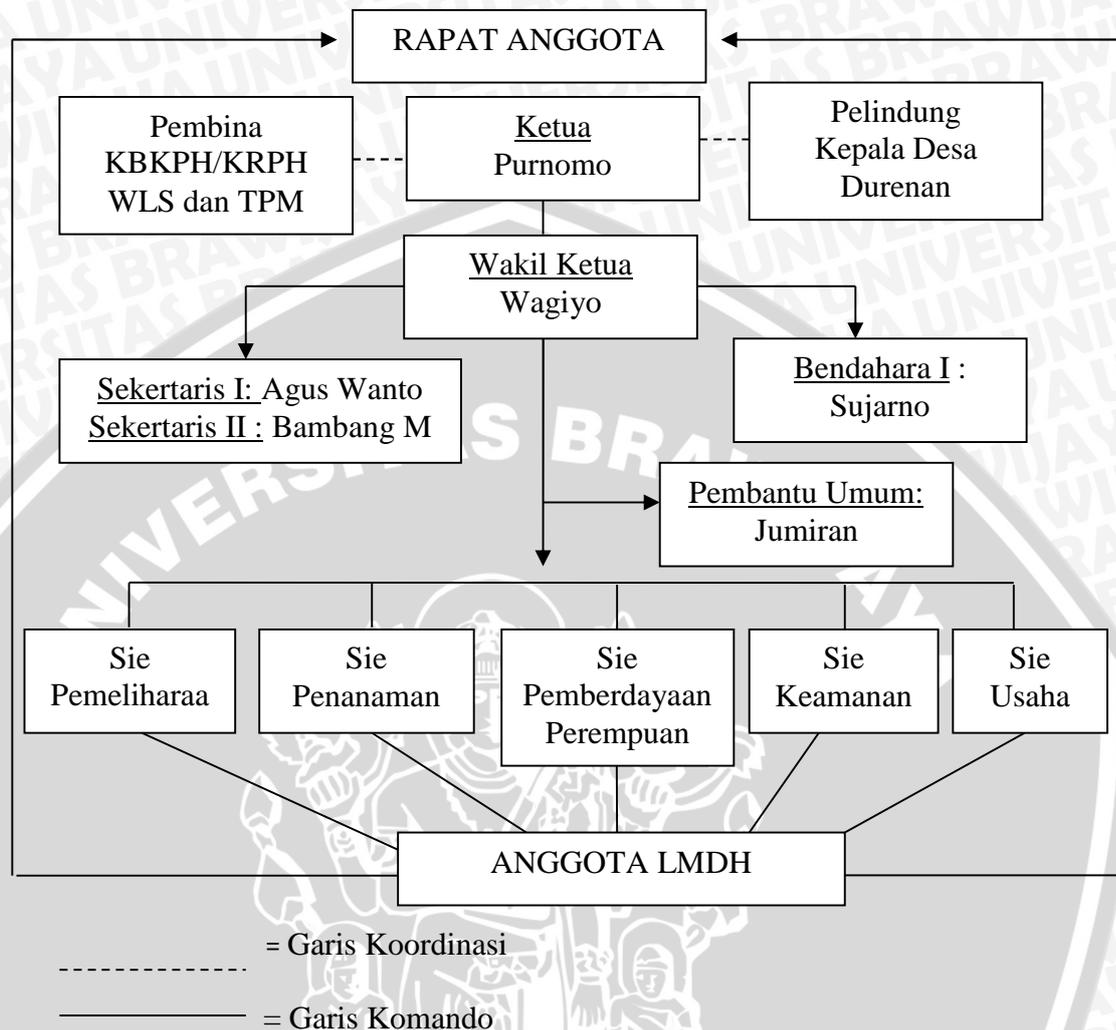
Sasaran LMDH Podang Wilis dalam pengelolaan hutan pangkuan Desa Durenan adalah :

- 1) Mengoptimalkan pemanfaatan lahan hutan yang kosong dengan tanaman kehutanan.
- 2) Pemanfaatan ruang di bawah tegakan untuk empon-empon, nilam, rosela dan HPT/rumput gajah, porang.
- 3) Pemeliharaan tegakan di petak pangkuan.
- 4) Peningkatan sumberdaya manusia.
- 5) Pengembangan usaha ekonomi produktif berbasis lahan maupun non lahan.
- 6) Perluasan jaringan komunikasi dengan pihak terkait.

d. Struktur Organisasi LMDH Podang Wilis, Desa Durenan

Aturan-aturan penting di dalam organisasi adalah seperti yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) LMDH Podang Wilis, dan kesepakatan perjanjian kerjasama antara Perhutani dengan LMDH Desa Durenan.

Adapun susunan pengurus LMDH Podang Wilis adalah sebagai berikut :



Gambar 2 Struktur Organisasi LMDH Podang Wilis, Desa Durenan
 Sumber : Dok. Sekretariat LMDH Podang Wilis, 2014

(2) Gambaran Umum Kesatuan Pemangkuan (KPH) Saradan

a. Kondisi Geografis

Kesatuan Pemangkuan Hutan Saradan merupakan salah satu bagian dari Perum Perhutani Jawa Timur Unit II. KPH Saradan memiliki luas hutan pangkuan seluas 37.934,66 Ha, yang berada pada empat Kabupaten Madiun, Bojonegoro, Ngawi dan Nganjuk dengan batas-batas sebagai berikut :

Tabel 10

Batas Wilayah Pengelolaan Hutan KPH Saradan

NO	Uraian	Kabupaten
1	Bagian Utara	KPH Bojonegoro
2	Bagian Timur	KPH Nganjuk
3	Bagian Selatan	KPH Madiun
4	Bagian Barat	KPH Ngawi

Sumber : Arief Budiono, 2008:58

Luas hutan pangkuan KPH Saradan seluas 37.924,7 hektar terdiri atas hutan produksi seluas 35.471,7 Ha dan hutan lindung seluas 2.462,9 Ha sisanya merupakan hutan kosong (rusak) seluas 7.795,7 Ha, yang terletak di empat Kabupaten sebagai berikut:

Tabel 11

Luas Hutan Pangkuan KPH Saradan

NO	Kabupaten	Hutan Produksi (H)	Hutan Lindung (H)
1	Madiun	20.004,2	1.933,9
2	Ngawi	5.307,5	13,7
3	Nganjuk	550,2	63,7
4	Bojonegoro	6.609,7	451,6
	Jumlah	35.471,7	2.462,9

Sumber : Arief Budiono, 2008:61

Secara Geografis wilayah yang dikelola KPH Saradan terletak pada garis 4°50' s/d 5°10' BT dan 7°30' s/d 7°50' LS. Secara Administrasi KPH Saradan berkedudukan di Jl. Rimba Raya Kota Madiun.

b. Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)

Pengelolaan sumberdaya hutan di Pulau Jawa dilaksanakan dengan mengikutsertakan Masyarakat Desa sekitar Hutan, secara kelompok dan kelembagaan. Sesuai dengan Visi dan Misi Perusahaan serta Paradigma Baru Pengelolaan Sumberdaya Hutan berbasis masyarakat, maka pemberdayaan dan peningkatan peran serta Masyarakat Desa Hutan (MDH) dan pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumberdaya hutan menjadi penting dan strategis sehingga perlu lebih dimaknai, diwadahi, difasilitasi dalam pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat. (Sumber : Biro Kelola SDH Perum Perhutani Unit II Jawa Timur, 2010)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor: 682/KPTS/DIR/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat. Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dan atau Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak lain yang berkepentingan (*stakeholder*) dengan jiwa berbagi, sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional.

c. Dasar Hukum Pelaksanaan PHBM

Berbagai regulasi atau peraturan yang menjadi dasar hukum bagi pengembangan Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat antara lain:

1. Undang-Undang No. 41/2009 tentang Kehutanan
2. Peraturan Pemerintah No. 6/2007 Jo PP 3/2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan.
3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 03/2004 tentang Pedoman Hutan Rakyat.
4. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.33/Menhut-II/2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-Ii/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Hak.
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan Jo Peraturan Menteri Kehutanan No: P. 18/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan No P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan jo Permenhut No: P. 13/Menhut-II/2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan No P.37/ Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan Jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 52/Menhut- II/2011 tentang perubahan ketiga terkait pelaksanaan Hutan Kemasyarakatan.

6. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.49/2008 tentang Hutan Desa Jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 14/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/MENHUT-II/2008 tentang Hutan Desa Jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 53/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Kehutanan mengenai Hutan Desa.
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/2009 Tentang Strategi Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Nasional.
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/2011 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman.
9. Keputusan Direktur Jendral Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial No. SK.50/V-UPR/2004.
10. Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor: 682/KPTS/DIR/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat.

d. Maksud dan Tujuan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)

1. Pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat dimaksudkan untuk memberikan arah pengelolaan sumberdaya hutan dengan memadukan aspek-aspek ekonomi, ekologi dan sosial secara proporsional guna mencapai Visi dan Misi Perum Perhutani.

2. Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat bertujuan untuk :
 - a) Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lebih fleksibel.
 - b) Meningkatkan tanggungjawab Perum Perhutani, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan.
 - c) Meningkatkan peran Perum Perhutani, peran dan akses masyarakat desa hutan serta pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumberdaya hutan.
 - d) Menselaraskan kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan sesuai dengan kegiatan pembangunan wilayah sesuai dengan kondisi dan dinamika sosial masyarakat desa hutan.
 - e) Meningkatkan sinergitas dengan Pemerintah Daerah Dan Stakeholder.
 - f) Meningkatkan usaha-usaha produktif menuju masyarakat mandiri hutan lestari.
 - g) Mendukung peningkatan IPM dengan 3 indikator : tingkat daya beli, tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan.
- e. Strategi Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)

Adapun strategi yang terdapat dalam program PHBM adalah:

- 1) Merubah mindset dari yang birokratif, sentralistik, kaku, ditakuti, menjadi fasilitator, fleksibel, akomodatif dan dicintai. Melalui pelatihan yang partisipatif berbasis *Community Development*.

Menerapkan pengenalan desa secara partisipatif (DPD) atau metode lain yang dilaksanakan bersama masyarakat dan atau pihak yang berkepentingan secara konsisten dan konsekuen.

- 2) Menselaraskan pengelolaan sumberdaya hutan dengan pembangunan wilayah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.
- 3) Melakukan pendekatan melalui LMDH dengan skala prioritas pada MDH yang berinteraksi langsung dengan desa tertinggal.
- 4) Seluruh wilayah pengelolaan dalam kawasan hutan ditentukan keseluruhannya dalam administrasi desa yang selanjutnya disebut Kawasan Hutan Pangkuan Desa (KPD).
- 5) Semua kegiatan dalam pengelolaan hutan di upayakan dikerjasamakan atau melibatkan LMDH dan atau pihak lain yang berkepentingan.
- 6) Meningkatkan sinergitas dengan lintas Departemen, Pemprov, Pemkab, Pemdes dan lembaga lainnya.
- 7) Keberhasilan PHBM merupakan salah satu parameter utama untuk penilaian kinerja pejabat Perum Perhutani.
- 8) Mengembangkan dan meningkatkan usaha produktif LMDH.
- 9) Meningkatkan peran keamanan hutan pada LMDH.
- 10) Membangun pusat pelatihan dengan metode partisipatif atau yang berbasis *Community Development*.

B. Penyajian Data

1. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa Hutan di Desa Durenan Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun

a. Proses Pemberdayaan Masyarakat sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa Hutan di Desa Durenan

Pemberdayaan masyarakat memerlukan sebuah proses yang harus dilalui masyarakat dan bukan merupakan suatu proses yang instan. Proses pemberdayaan masyarakat melalui program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) mengupayakan agar masyarakat desa hutan dapat ikut berpartisipasi dalam pengelolaan hutan dan menciptakan masyarakat yang produktif dan inovatif. Melalui program PHBM diharapkan masyarakat desa hutan bersama dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dapat bertransformasi menjadi masyarakat yang produktif dan mandiri.

Akar permasalahan yang menyebabkan kerusakan hutan seperti pencurian kayu adalah karena faktor ekonomi masyarakat yang tidak tercukupi. Visi dan misi dari pembentukan LMDH adalah melestarikan hutan dan mensejahterakan masyarakat. LMDH Podang Wilis berfungsi sebagai lembaga yang ikut serta dalam pengelolaan hutan dan merupakan lembaga yang memiliki peran untuk mensejahterakan masyarakat desa hutan di Desa Durenan. Sangat sulit untuk menekan angka pencurian kayu ketika masyarakat desa hutan itu sendiri tidak dapat terpenuhi kebutuhan

ekonominya, maka kesejahteraan masyarakat desa hutan harus diupayakan. (wawancara tanggal 4 April 2014).

Perencanaan sebagai salah satu tahapan dalam pengelolaan hutan menjadi sebuah tahap yang sangat menentukan keberlangsungan berbagai kepentingan tersebut. perencanaan pengelolaan hutan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak, tetapi harus melibatkan pihak-pihak yang terkait. Perencanaan pengelolaan hutan hendaknya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan banyak pihak, yaitu : Perum Perhutani, LMDH, Pemerintah Desa, BPD, LPKMD, Petani Hutan, tokoh masyarakat dan kelompok masyarakat lain di Desa Durenan. (Sumber : Sekertariat LMDH Podang Wilis, 2014)

Proses pemberdayaan masyarakat desa hutan yang ada di Desa Durenan diawali dengan proses sosialisasi, proses tersebut dilakukan secara *'door to door'* selama 2 (dua) tahun untuk mengenalkan program PHBM kepada masyarakat Desa Durenan. Proses sosialisasi berjalan dengan lambat dikarenakan kualitas SDM Masyarakat yang masih rendah, namun komunikasi sosial tetap dibangun dan tetap dijalankan agar masyarakat dapat memahami tentang program PHBM. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat memahami arti dari PHBM dan dapat mengerti maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang di buat oleh LMDH Podang Wilis. Sangat sulit membuat masyarakat dengan SDM rendah untuk mau berpartisipasi dalam program jika tidak dibekali dengan pengetahuan dan pelatihan yang cukup. Ketika masyarakat sudah mulai mengenal dan memahami tentang konsep

PHBM barulah pemberdayaan masyarakat desa hutan dapat mulai dijalankan melalui kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh LMDH Podang Wilis. Pertemuan atau rapat anggota dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam 1 bulan, hal tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi tentang apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Masyarakat juga dapat memberikan ide dan masukan untuk kegiatan yang akan dilakukan yang sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Kegiatan evaluasi juga dilakukan dalam rapat anggota tersebut untuk mengevaluasi kegiatan selama 1 bulan (wawancara 4 April).



Gambar 3 Kegiatan Rapat Anggota LMDH Podang Wilis

Sumber : Dok. Sekertariat LMDH Podang Wilis, 2013

Kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan hutan pangkuan Desa Durenan dilaksanakan bersama oleh LMDH, FK PHBM Desa Durenan, Pemerintah Desa Durenan, Perhutani dan pihak lain yang berkepentingan. Kegiatan monitoring dilaksanakan selama kegiatan berjalan dan berakhirnya

kegiatan pengelolaan hutan. Kegiatan evaluasi dilaksanakan pada : setiap akhir kegiatan, setiap tahun sekali, dan setiap berakhirnya jangka waktu kegiatan. Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada rapat rutin pengurus LMDH, rapat anggota LMDH, dan pertemuan-pertemuan yang dibutuhkan untuk kepentingan tersebut. (Sumber : Sekertariat LMDH Podang Wilis, 2014)

Awal mula pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh LMDH Podang Wilis adalah berupa program USP (unit simpan pinjam), pada saat itu hampir semua masyarakat menjadi nasabah tetapi dengan adanya USP tidak ada peningkatan ekonomi yang cukup besar. Permasalahannya adalah masyarakat meminjam uang hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari dan tidak dijadikan sebagai sumber pendapatan mereka. Pada akhirnya masyarakat tersebut mengalami kesulitan saat harus mengembalikan pinjaman. Berdasarkan pengalaman tersebut LMDH Podang Wilis merubah pola pemberdayaan yang dilakukan dan digantikan dengan pemberdayaan masyarakat yang lebih mengarah kepada pembangunan berkelanjutan dengan cara mengajak mereka untuk membuat sumber pendapatan mereka sendiri yang sesuai dengan potensinya dan dibantu oleh Koperasi Masyarakat Desa Hutan (KMDH) Podang Wilis. Seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat dibiayai oleh KMDH Podang Wilis termasuk dalam pemberian pinjaman modal usaha berupa pupuk, bibit, hewan ternak, pakan dan lain-lain dengan sistem bagi hasil. (wawancara 4 April 2014)

Banyak sekali kegiatan-kegiatan pemberayaan masyarakat yang ada di LMDH Podang Wilis, LMDH Podang Wilis mengajak masyarakat desa hutan Durenan untuk mau mengembangkan potensinya, dalam upaya pemberdayaan masyarakat LMDH ini telah mengembangkan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa hutan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak P (49th) selaku ketua LMDH Podang Wilis sebagai berikut :

“... banyak sekali mbak program yang ada di LMDH kami, salah satu tema yang kami angkat untuk pemberdayaan masyarakat di sini itu adalah “Main Utek” (Masyarakat Inovatif, Usaha Terpadu, dan Ekonomi Kerakyatan). Apa saja potensi yang ada di sini itu kami kembangkan, satu contoh di sini itu adalah daerah terbesar yang memproduksi singkong di Kabupaten Madiun jadi kami memproduksi tepung Mocaf, kripik singkong, dan produk-produk lain berbahan dasar singkong. Kami pernah studi banding ke Kediri di sana itu ada satu desa yang penduduknya sukses sebagai pembuat krupuk yang bahan bakunya itu dari tepung mocaf yang kami produksi, kalau mereka saja bisa sukses kita yang punya bahan baku kenapa tidak. Jadi intinya kami ingin mengajak masyarakat untuk lebih inovatif dalam mengembangkan potensi yang ada” (wawancara 4 April 2014)

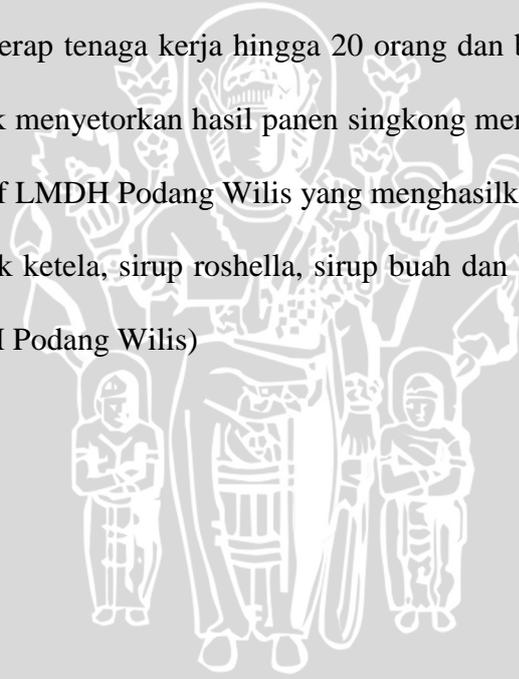
Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Bapak D (51th) masyarakat Desa Durenan sebagai berikut :

“... baonnya saya tanami singkong mbak, hasilnya tiap panen itu sekitar 1,5 ton. Langsung saya jual ke koperasi untuk di jadikan tepung mocaf, sebagaian juga diolah jadi kripik untuk dijual, kulitnya juga laku buat di jual mbak jadi sekarang saya tidak pernah jual ke tengkulak dari luar lebih enak diolah sendiri saja untungnya lebih banyak. (wawancara 16 April 2014)

Pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Durenan tidak hanya berbasis lahan saja, namun mengajak masyarakat untuk juga melakukan usaha produktif. Desa Durenan merupakan daerah yang memproduksi singkong terbesar di Kabupaten Madiun sehingga untuk dapat memanfaatkan

potensi tersebut masyarakat diberdayakan untuk dapat membuat produk-produk dengan bahan dasar singkong. Hasil olahan dari produk-produk dengan bahan dasar singkong tersebut akan memberikan untung yang lebih besar daripada hanya dijual secara mentah kepada tengkulak.

Pemanfaatan lahan di bawah tegakan sangat membantu masyarakat yang bertani untuk mendapat lahan garapan yang dipinjamkan untuk ditanami tanaman seperti jagung, porang, singkong, roshella dan lain-lain. Masyarakat juga di ajak untuk melakukan usaha produktif seperti adanya pabrik tepung mocaf yang menyerap tenaga kerja hingga 20 orang dan bermitra dengan 19 orang petani untuk menyetorkan hasil panen singkong mereka kepada pabrik. Kegiatan produktif LMDH Podang Wilis yang menghasilkan produk rumahan yaitu berupa kripik ketela, sirup roshella, sirup buah dan lain-lain. (sumber : Sekertariat LMDH Podang Wilis)





Gambar 4 Kegiatan Pembuatan Tepung Mocaf di Desa Durenan
Sumber : Dok. Sekertariat LMDH Podang Wilis, 2013

Berdirinya LMDH Podang Wilis pada tahun 2003 diharapkan mampu membawa dampak yang positif bagi masyarakat desa hutan yang ada di Desa Durenan. Hal ini terlihat dengan adanya kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat yang mampu diterima dengan baik oleh masyarakat. Masyarakat desa hutan diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan hutan dan melakukan usaha-usah produktif. Beberapa kegiatan yang telah dikembangkan oleh LMDH Podang Wilis mencakup berbagai macam sektor.

Pada sektor peternakan terdapat ternak bebek, koperasi memberikan bantuan berupa bibit bebek dan pakan untuk di kelola oleh masyarakat dengan sistem bagi hasil.



Gambar 5 Kegiatan Ternak Bebek pinjaman modal usaha dari KMDH Podang Wilis

Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2014

Selanjutnya untuk ternak kambing koperasi memberikan kambing kepada masyarakat untuk dipernakan setelah beranak pinak kambing-kambing tersebut digilirkan kepada penduduk yang belum memiliki kambing. Sampai saat ini jumlah kambing yang dipelihara oleh masyarakat desa hutan

Durenan hasil dari peminjaman ternak kambing oleh KMDH Podang Wilis berjumlah lebih dari 130 ekor kambing. (wawancara tanggal 4 April 2014).



Gambar 6 Kegiatan Ternak Kambing Pinjaman dari KMDH Podang Wilis

Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2014

Pada sektor pertanian berupa padi, jagung, kacang tanah, kacang panjang dan ketela sedangkan untuk hasil perkebunan berupa mangga, durian, roshella, alpokat dan jengkol. KMDH Podang Wilis memberikan lahan garapan bagi masyarakat yang au mengelola lahan di bawah tegakan dan juga menyediakan pinjaman bahan-bahan pertanian untuk menunjang masyarakat seperti bibit, pupuk, dan obat-obatan yang akan dibayar ketika panen. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi dominasi para tengkulak yang meminjamkan pupuk dengan harga yang sangat tinggi. KMDH Podang Wilis menaikkan harga pupuk tidak lebih dari 2% dari harga eceran tujuannya adalah agar masyarakat tetap bisa bercocok tanam dan bisa mendapatkan untung yang semestinya.



Gambar 7 Gambar Pemanfaatan Lahan dibawah Tegakan di Desa Durenan

Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2014

Pada sektor pendidikan LMDH Podang Wilis meberikan kursus komputer secara gratis untuk tingkat “PAUD” dan Memberikan bantuan beasiswa kepada siswa dari keluarga kurang mampu, bekerja sama dengan yayasan PAB Surabaya.



Gambar 8 Kegiatan Pemberian Beasiswa untuk Siswa Kurang Mampu di Desa Durenan

Sumber : Dok. Sekertariat LMDH Podang Wilis, 2014

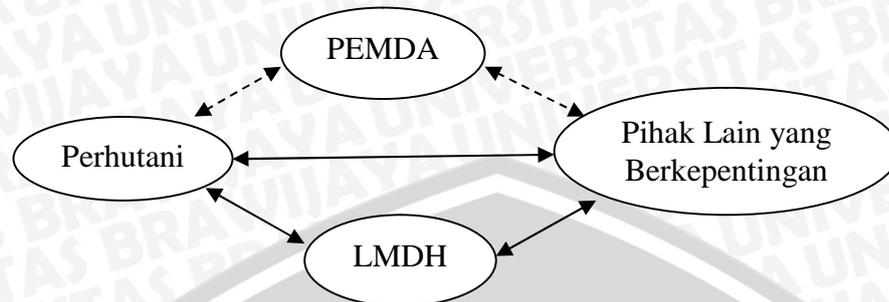
Pada sektor lingkungan hidup salah satu program LMDH Podang Wilis adalah Rumah Sayur Hijau (RTH), program ini dikelola dan dikembangkan oleh Kelompok Wanita Tani Hutan (KWTH) Podang Wilis. Pengeluaran setiap kepala keluarga di Desa Durenan untuk membeli kebutuhan konsumsi sayur setiap harinya mengeluarkan biaya sebesar Rp. 5000,- hanya untuk membeli sayur-sayuran seperti cabe, tomat, terong dan lain-lain. Program ini mengajak setiap rumah di Desa Durenan untuk menanam minimal 20 pot sayur di setiap rumah, maka setiap harinya masyarakat tidak usah membeli sayur. Tujuan dari program RSH yang pertama adalah untuk mengurangi pengeluaran penduduk minimal Rp. 5000,- perhari dan yang kedua agar masyarakat lebih sehat karena sayur yang ditanam berasal dari bahan-bahan organik. Program RSH ini juga sekaligus menjadi hijauan lingkungan yang juga merupakan program pemerintah Kabupaten Madiun yang diawali oleh LMDH Podang Wilis. (wawancara tanggal 4 April 2014).



Gambar 9 Kegiatan RSH (Rumah Sayur Hijau) di Desa Durenan

Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2014

Pada sektor seni dan budaya LMDH Podang Wilis memiliki seni karawitan yang bernama “Purbo Wilis Laras”. Warga Desa Durenan jika



Gambar 11 Pola Kerjasama dalam PHBM

Sumber : Dok. Biro Kelola SDH Perum Perhutani Unit II Jawa Timur, 2010

LMDH adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa yang berada didalam atau sekitar hutan untuk mengatur dan memenuhi kebutuhannya melalui interaksi terhadap hutan dalam konteks sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Sebagai salah satu pihak yang memiliki peran sebagai lembaga yang memayungi masyarakat desa hutan LMDH memiliki tugas dan kewajiban memberdayakan masyarakat desa hutan. Adapun tugas-tugas lain dari LMDH adalah 1) Membina kelompok kerja, 2) Menjamin keberhasilan tanaman hutan, 3) Melindungi dan melestarikan sumberdaya hutan untuk keberlanjutan fungsi dan manfaatnya. (Sumber : Biro Kelola SDH Perum Perhutani Unit II Jawa Timur, 2010)

Perum Perhutani memegang peran yang penting dalam pemberdayaan masyarakat salah satunya adalah mendampingi LMDH dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Selain itu Perhutani juga melakukan pelatihan-pelatihan usaha produktif dan kewirausahaan untuk LMDH yang kemudian akan diterapkan ke dalam program-program LMDH itu sendiri. Adapun tugas-tugas lain dari Perum Perhutani adalah 1) Menyusun rencana,

melaksanakan, memantau dan menilai pelaksanaan PHBM bersama LMDH dan pihak yang berkepentingan, 2) Memberikan kontribusi dalam kegiatan sesuai dengan rencana, 3) Mempersiapkan sistem, struktur dan budaya perusahaan yang kondusif, 4) Bekerjasama dengan LMDH dan pihak yang berkepentingan dalam rangka mendorong proses optimalisasi dan berkembangnya kegiatan. (Sumber : Biro Kelola SDH Perum Perhutani Unit II Jawa Timur, 2010)

Peran pemerintah juga sangat besar terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di LMDH Podang Wilis, walaupun keberadaan LMDH seringkali tidak dikenali oleh pemerintah. Pemerintah juga sering menyalah artikan bahwa LMDH adalah sepenuhnya milik dan tanggungjawab Perhutani, padahal Perhutani tidak memiliki masyarakat hanya memiliki wilayah kerja saja. Masyarakat adalah sepenuhnya milik pemerintah yang harus diupayakan kesejahteraannya oleh karena itu peran pemerintah sangat diperlukan. Pemerintah sudah sangat berperan terhadap pemberdayaan masyarakat di LMDH Podang Wilis. (wawancara 4 April 2014)

Adapun jenis bantuan dari Pemerintah yang telah diterima oleh LMDH Podang Wilis sebagai berikut :

Tabel 12
Bantuan Pemerintah yang Telah diterima oleh LMDH Podang Wilis

NO	JENIS BANTUAN	SUMBER BANTUAN	KETERANGAN
1	Bantuan benih porang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Madiun	Tahun 2009
2	Dana permodalan untuk Koperasi LMDH	Dinas Koperasi	Tahun 2010
3	Dana bantuan permodalan Koperasi	Gubernur Jatim	Tahun 2011
4	Bantuan bibit pohon jati untuk rehabilitasi hutan	Dinas Kehutanan	Tahun 2011

Sumber : Dokumen Sekertariat LMDH Podang Wilis, 2014

Pemerintah daerah berperan sebagai pelindung dalam organisasi LMDH sekaligus ikut mengamankan sumberdaya hutan. Pemerintah daerah juga ikut membimbing dan memberdayakan masyarakat desa hutan dan memfasilitasi kegiatan PHBM. Bersama-sama Perum Perhutani, MDH dan pihak yang berkepentingan mendorong proses optimalisasi dan berkembangnya kegiatan. (Sumber : Biro Kelola SDH Perum Perhutani Unit II Jawa Timur, 2010)

Pihak lain yang memegang peran penting dalam pelaksanaan program PHBM adalah pihak yang berkepentingan (stakeholder). Adapun tugas dari pihak yang berkepentingan (stakeholder) adalah 1) Bersama Perum Perhutani dan LMDH melindungi dan melestarikan sumberdaya untuk keberlanjutan fungsi dan manfaatnya, 2) Memberi kontribusi dalam kegiatan sesuai dengan

kemampuannya. (Sumber : Biro Kelola SDH Perum Perhutani Unit II Jawa Timur, 2010). Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan LMDH Podang Wilis bersama dengan Stakeholder sebagai berikut :

Tabel 13
Kegiatan LMDH yang Bekerjasama dengan Stakeholder

No	NAMA STAKEHOLDER	JENIS KEGIATAN	TAHUN
1	PT. BISI 2	Pengembangan tanaman jagung dan tanaman kacang panjang	2009-2010
2	PT. GIS Jember	Penanaman pembibitan jagung seluas 45 Ha	2010-2011
3	Dinas Kehutanan kab. Madiun	Pembuatan bibit pohon jati untuk rehabilitasi hutan	2010
4	Perum Perhutani	Pengembangan hutan rakyat seluas 25 Ha	2010
5	Dispering kab.Madiun	Pengembangan Mocaf	2012
6	Lesehan	Pengembangan IT	2011
7	Pemerintah Desa	Kerjasama Dalam Kesehatan masyarakat	2010-Sekarang
8	Dinas Kehutanan Kab.madiun	Kerjasama dalam rehabilitasi lahan seluas 40 Ha. Di Dsn.Bulu desa Durenan	2012
9	Badan Ketahanan Pangan Kab.Madiun	Kerjasama dalam rangka pembinaan Masyarakat dalam Penyediaan ketahanan pangan	2011
10	BANK BNI	Kerjasama kegiatan simpan pinjam, dengan pinjaman modal 500 juta rupiah	2012

Sumber : Dok. Sekertariat LMDH Podang Wilis, 2014

Terdapat beberapa aktor yang sangat berperan dalam pelaksanaan program PHBM di Desa Durenan dari hasil wawancara dengan ketua LMDH Podang Wilis Bapak P (49th) bahwa anggota LMDH Podang Wilis berjumlah

sekitar 1.063 kepala keluarga yang terdiri dari beberapa desa, di dalam LMDH Podang Wilis terdapat 3 kelas keanggotaan yaitu :

- 1) Anggota biasa yaitu masyarakat Desa Durenan yang menjadi penggarap (pesanggem) di lahan hutan pangkuan LMDH Podang Wilis dan bertanggung jawab untuk menggarap lahan tersebut.
- 2) Anggota luar biasa adalah anggota luar daerah atau masyarakat di luar Desa Durenan tetapi menjadi pesanggem (penggarap lahan) dan juga memiliki tanggung jawab untuk menggarap lahan di hutan pangkuan LMDH Podang Wilis.
- 3) Anggota istimewa atau stakeholder atau pihak ketiga yaitu anggota yang ikut membantu program-program LMDH seperti Perum Perhutani, Pemerintah Desa, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Anggota istimewa adalah pihak-pihak yang bergabung dan membantu LMDH Podang Wilis tetapi tidak memiliki tanggungjawab untuk menggarap lahan atau anggota bukan pesanggem, kebanyakan anggota istimewa ini berasal dari luar Desa Durenan.

c. Capaian Hasil dari Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program PHBM Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa Hutan di Desa Durenan

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di Desa Durenan telah memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat di dalamnya. Kemiskinan sosial yang ada di Desa Durenan dapat diperkecil melalui

pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan. Hal ini bisa dilakukan dengan pembangunan jalan dan memfasilitasi masyarakat dengan transportasi yang dapat membantu masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang ada di LMDH Podang Wilis tidak hanya memberikan keuntungan kepada masyarakat desa hutan saja tetapi juga dapat memberikan keuntungan bagi koperasi sehingga keuntungan tersebut dapat disalurkan melalui pembangunan sarana dan prasarana desa yang dapat memudahkan masyarakat. Pembangunan sarana dan prasarana tersebut berupa pembangunan jalan beton yang memudahkan akses jalan-jalan masuk desa yang jauh dari jalan raya dan fasilitas kendaraan gratis untuk ke rumah sakit bagi keluarga miskin. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak P (49th) selaku ketua LMDH Podang Wilis :

“... kami menyediakan kendaraan gratis untuk keluarga miskin karena dari sini rumah sakit sangat jauh mbak. Kami antar secara gratis baik untuk orang sakit maupun melahirkan karena di sini itu desa siaga, tidak ada kendaraan. Termasuk juga pembangunan jalan beton desa yang tadi mbak lewati sejauh 600 meter itu kami yang bangun belum termasuk jalan-jalan masuk desa, tujuannya adalah kami juga ingin memberikan kontribusi terhadap masyarakat dan seluruh kegiatan sosial tersebut diibiayai oleh KMDH Podang Wilis” (wawancara 4 April 2014)

Manfaat tersebut cukup dirasakan oleh penduduk Desa Durenan seperti yang diungkapkan oleh Bapak B (45th) penduduk Desa Durenan :

“...dulu sebelum jadi jalan beton jalan-jalan masuk di sini itu makadam mbak jadi sekarang cukup mempermudah masyarakat karena jalannya menjadi enak untuk dilewati. Kalau untuk kendaraan memang dari sini rumah sakit jauh mbak, kalau mau ke rumah sakit ya biasanya orang-orang sini minta tolong sama kendaraan koperasi karena angkutan umum itu tidak sampai ke sini, Cuma sampai ke Pasar Gosong saja ...” (wawancara tanggal 16 April 2014).



Gambar 12 Jalan Beton yang di Bangun oleh KMDH Podang Wilis di Desa Durenan

Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2014

Manfaat dari hasil pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Durenan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat melalui pembangunan infrastruktur desa yang memudahkan masyarakat. Pembangunan jalan beton membantu masyarakat untuk berjalan baik dengan jalan kaki ataupun motor karena kondisi jalan yang baik. Penyediaan transportasi secara gratis memudahkan masyarakat miskin untuk pergi ke rumah sakit saat keadaan darurat karena transportasi umum tidak ada dan jarak rumah sakit ataupun puskesmas yang jauh dari Desa Durenan.

Kemiskinan ekonomi dapat diatasi melalui kegiatan-kegiatan LMDH dengan pola pemberdayaan ekonomi yang mengajak masyarakat untuk dapat mengelola hutan seperti pemeliharaan tegakan di petak pangkuan dan pemanfaatan ruang di bawah tegakan serta pengembangan usaha ekonomi produktif berbasis lahan maupun non lahan. Pemberdayaan masyarakat juga dilakukan dengan cara memberikan bantuan untuk membantu masyarakat

dalam bidang ekonomi maupun bahan-bahan pertanian melalui dana simpan pinjam, tujuannya adalah supaya masyarakat dapat mandiri dan mendapatkan harga yang semestinya untuk bahan-bahan pertanian sehingga masyarakat bisa mendapatkan keuntungan. Adapun data masyarakat yang telah melakukan pinjaman modal kepada KMDH Podang Wilis, sebagai berikut :

Tabel 14
Data Jumlah masyarakat yang melakukan pinjaman kepada KMDH Podang Wilis

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	Anggota KMDH Podang Wilis	126
2	Masyarakat yang menerima pinjaman dari KMDH Podang Wilis	162
3	Anggota KMDH Podang Wilis yang menerima pinjaman	42
4	Masyarakat yang telah mengembalikan pinjaman kepada KMDH Podang Wilis	162

Beberapa manfaat yang dapat dirasakan masyarakat di Desa Durenan melalui pemberdayaan masyarakat melalui program PHBM yaitu masyarakat desa hutan dapat memanfaatkan lahan hutan dibawah tegakan untuk ditanami tanaman seperti empon-empon, nilam, rosela, rumput gajah, porang, singkon dan masih banyak lagi. Hal tersebut dapat memberikan penghasilan tambahan bagi yang tidak memiliki lahan untuk ditanami. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bapak P (49th) selaku ketua LMDH Podang Wilis :

“masyarakat di sini sangat menggantungkan hidupnya dari baon, jujur tanpa ada masyarakat yang bekerja di hutan masyarakat sini mau makan apa, wong lahannya lahan perkebunan dan panennya tiap tahun kalau mau menanam seperti singkong, jagung ya harus di hutan. Kami menggerakkan masyarakat untuk membersihkan lahan di bawah tegakan supaya lahan tersebut bisa ditanami ” (wawancara tanggal 4 April 2014).

Hal tersebut juga dikuatkan oleh pernyataan Ibu Y (22th) selaku bendahara LMDH Podang Wilis :

“...ibaratnya masyarakat di sini itu gak bisa makan kalau tidak ada baon mbak, karena di sini itu tidak ada sawah selain karena kesulitan air di sini juga tanahnya tanah padas mbak, jadi tidak cocok untuk dijadikan sawah” (wawancara tanggal 4 April 2014).

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pemanfaatan lahan di bawah tegakan sangat memberikan manfaat bagi masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu J (35th) petani yang menggarap lahan di bawah tegakan :

“...saya mendapatkan baon seluas setengah hektar mbak, saya tanami jagung dan singkong. Hasil panennya sekitar 2 ton panennya tiap 4 bulan sekali” (wawancara tanggal 16 April 2014)

Selain itu LMDH Podang Wilis juga telah memberikan manfaat untuk pinjaman modal bagi masyarakat desa hutan melalui koperasi, seperti yang diungkapkan oleh Ibu W (40th) petani yang menggarap lahan di bawah tegakan :

“...sejak menjadi anggota koperasi saya mendapat bantuan modal untuk menanam jagung mbak, apalagi kalau beli di koperasi itu harga pupuknya lebih murah” (wawancara 16 April 2014)

Pinjaman dana, lahan garapan, dan pelatihan-pelatihan usaha produktif yang diberikan kepada masyarakat sangat berdampak positif. Secar

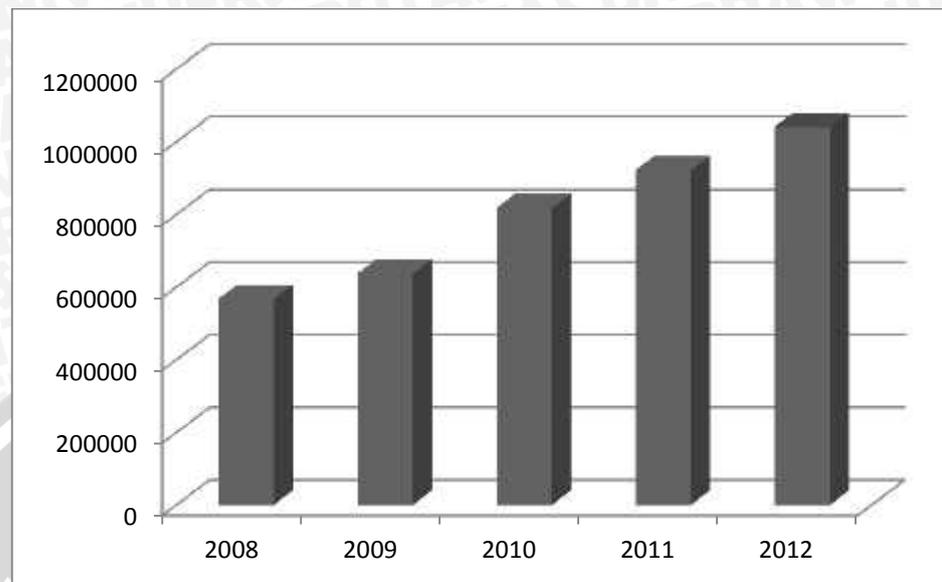
presentase jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) menjadi berkurang, seperti yang diungkapkan oleh Bapak P (49th) selaku ketua LMDH Podang Wilis :

“...dampak pemberdayaan masyarakat terhadap ekonomi masyarakat sini sangat besar sekali mbak. Tahun 2008 jumlah RTM di Desa kami itu 60,2% dan pada tahun 2010 menjadi sekitar 60% makanya pencurian kayu di sini itu tidak ada, karena kebutuhan ekonomi masyarakat tercukupi” (wawancara 4 April 2014)

Menurunnya jumlah RTM tiap tahun juga didukung oleh pernyataan Bapak S (33th) selaku Staf Umum Desa Durenan yang menyatakan bahwa :

“... jumlah RTM di Desa kami menurun mbak menurut data pada tahun 2012 jumlah RTM Desa Durenan berjumlah 808 Rumah Tangga dan pada Tahun 2013 turun menjadi 740 Rumah Tangga” (wawancara 30 April 2014)

Dengan adanya tambahan pemasukan bagi masyarakat desa hutan paling tidak masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya sehingga tercipta masyarakat yang mandiri. Selain itu, pendapatan masyarakat desa hutan pun mengalami peningkatan, hal ini juga terlihat dari rata-rata pendapatan masyarakat Desa Durenan yang mengalami peningkatan setiap tahunnya yang terlihat dari grafik dibawah ini :



Gambar 13 Rata-Rata Pendapatan Masyarakat Desa Durenan

Sumber : Dok. Instrumen Pendataan Profil Desa Durenan, 2012

Pada tahun 2008 rata-rata pendapatan masyarakat adalah Rp. 566.900; tahun 2009 Rp. 637.200; tahun 2010 Rp.817.600; tahun 2011 Rp. 921.600; tahun 2012 Rp. 1.041.000 (Sumber : Bagian Umum Pemerintah Desa Durenan) .

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program PHBM sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa Hutan di Desa Durenan Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun

Pelaksanaan program PHBM di Desa Durenan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi keberhasilan program PHBM dan juga terdapat faktor-faktor yang menjadi permasalahan dalam

pelaksanaan program PHBM di Desa Durenan. Faktor-faktor tersebut terdiri dari fakto pendukung dan faktor penghambat.

a. Faktor pendukung

Faktor pendukung yang mempengaruhi pelaksanaan program PHBM di Desa Durenan adalah kekompakan antara LMDH dan masyarakat desa hutan. Masyarakat sudah mulai paham apa itu PHBM, kegiatan-kegiatan yang di buat oleh LMDH Podang Wilis sudah bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Selain itu potensi yang ada di Desa Durenan sangat luar biasa. (wawancara 4 April 2014)

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan faktor pendukung yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program PHBM di Desa Durenan ada 2 (dua) yaitu : Pertama, antara LMDH Podang Wilis dan masyarakat desa hutan Durenan sudah sama-sama kompak dalam menjalankan perannya. Terlebih lagi masyarakat sudah paham mengenai PHBM sehingga program-program yang dimiliki oleh LMDH Podang Wilis dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Kedua, potensi yang ada di Desa Durenan sangat luar biasa, Desa Durenan terletak di daerah pegunungan Gunung Wilis maka dapat dipastikan potensi sumberdaya alam sangatlah mendukung seperti sektor pertanian maupun perkebunan.

Selain dua faktor pendukung tersebut masih ada faktor pendukung yang lain, seperti yang diungkapkan oleh Bapak I (35th) selaku KSS PHBM & Binling KPH Saradan :

“stakeholder juga sangat berpengaruh besar terhadap kesuksesan pelaksanaan program PHBM di Desa Durenan ini. Kerjasama yang

sudah dilakukan selama ini itu sangat luar biasa” (wawancara 4 April 2014)

Hal tersebut juga dikuatkan oleh pernyataan dari Bapak P (49th) selaku ketua LMDH Podang Wilis sebagai berikut :

“...stakeholder juga sangat luar biasa mbak, di sini itu kalau masalah permodalan jadi orang mau tanam saham disini itu saya sampai nolak-nolak karena usaha di sini itu sudah bisa berjalan” (wawancara 4 April 2014)

Pelaksanaan program PHBM dapat berjalan dengan lancar disebabkan karena antara lembaga, masyarakat desa hutan dan stakeholder bersinergi dengan baik. Keberhasilan pelaksanaan program PHBM yang ada di Desa Durenan juga dipengaruhi oleh faktor sumberdaya alam yang sangat berpotensi dan dikembangkan secara produktif dan inovatif oleh masyarakat desa hutan melalui kegiatan-kegiatan yang ada di LMDH Podang Wilis. Stakeholder atau pihak yang berkepentingan juga mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program PHBM di mana pihak tersebut ikut membantu dan mendukung dalam program-program yang ada di LMDH Podang Wilis, bentuk bantuan dan dukungan tersebut dapat berupa modal, pelatihan maupun bimbingan yang dilakukan oleh stakeholder.

b. Faktor Penghambat

Selain faktor pendukung terdapat pula faktor penghambat dalam pelaksanaan program PHBM yang ada di Desa Durenan yaitu pola pemikiran masyarakat yang masih rendah dikarenakan kualitas SDM masyarakat Desa Durenan yang masih rendah. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bapak P (49th) selaku ketua LMDH Podang Wilis :

“... kendala yang ada di disini itu adalah sulitnya mengajak masyarakat untuk mau ikut dalam program-program yang kami buat. Sampai saat ini pola pemikiran masyarakat yang perlu kami bangun, kami di sini menghadapi masyarakat dengan SDM rendah sangat sulit mbak. Contohnya program RSH ini baru satu tahun bisa berjalan, padahal kan sudah jelas kalau mereka mau menanam sayur sendiri kan setiap hari tidak usah beli sayur jadi ada pengeluaran sebesar ± Rp. 5000,- yang dapat dipangkas dan bahan-bahan seperti polyback dan bibit juga kita yang sediakan tapi banyak sekali mbak alasan dari masyarakat ini. Namun ketika sudah ada yang berhasil baru masyarakat tertarik untuk mengikutinya dan sekarang sudah banyak yang mau ikut program RSH ini. Jadi intinya masyarakat disini itu harus ditunjukkan dulu baru mereka mau melakukan juga” (wawancara 4 April 2014)

Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan B Sugeng (52th) Selaku

Kepala Desa Durenan sebagai berikut :

“kendala utama pemberdayaan yang ada di sini itu memang terletak pada sosialisasinya. Kualitas SDM masyarakat di sini itu rendah mbak, jadi sulit untuk mengajak masyarakat walaupun mereka tahu sebenarnya tujuannya baik. masyarakat di sini itu harus ditunjukkan dulu hasil dari kegiatannya baru mereka mau ikut-ikutan apalagi jika hasil dan manfaat dari kegiatan tersebut besar sekali” (wawancara 28 April 2014)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa akar permasalahan dalam pelaksanaan pemberdayaan adalah kualitas SDM masyarakat yang masih rendah. Hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat untuk dapat memberdayakan dirinya sendiri dan mengembangkan potensi yang ada. Kecenderungan masyarakat Desa Durenan yang baru mau mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di LMDH Podang Wilis jika sudah ada contoh yang sudah berhasil juga menandai rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk dapat memberdayakan dirinya sendiri.

Selain masih rendahnya kualitas SDM masyarakat Desa Durenan terdapat faktor lain yang mempengaruhi terhambatnya pelaksanaan program PHBM di Desa Durenan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak P (49th) selaku ketua LMDH Podang wilis :

“...ada suatu hal yang membuat pertumbuhan ekonomi di sisni itu terhambat mbak yaitu rentenir dan tengkulak atau pihak ketiga yang masuk tanpa melalui lembaga. Di sini kan banyak pohon mangga, durian, alpukat mbak, kalau rentenir itu meminjamkan uang dengan hasil panen dari penduduk tersebut yang menjadi jaminannya. Jadi sebelum uang yang dipinjam penduduk itu dikembalikan secara utuh hasil panennya yang ambil itu rentenir. Kalau dibiarkan yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin mbak makanya kami melakukan berbagai sosialisasi dan memberikan kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan tambahan pendapatan sehingga mereka dapat melunasi hutangnya. Dulu hampir 80% masyarakat di sini itu menggadaikan aset-asetnya tapi sekarang sudah berkurang banyak. Artinya masyarakat sudah mulai terbangun pola pikirnya dan pendapatan sudah cukup meningkat sehingga sudah bisa mengembalikan hutangnya karena hutang itu bisa berlangsung cukup lama mbak” (wawancara 4 April 2014)

Bedasarkan wawancara tersebut menjelaskan bahwa masyarakat Desa Durenan dahulu hampir 80% menggadaikan aset-aset mereka seperti pohon mangga, durian, alpokat, jengkol sebagai jaminan untuk meminjam uang kepada rentenir. Hal tersebut menjadi salah satu faktor penghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat karena masyarakat yang memiliki aset tidak dapat menikmati hasil panennya jika masih memiliki hutang kepada rentenir dan memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengembalikan kepada rentenir tersebut. Saat ini masyarakat sudah mulai sadar dan terbangun pola pikirnya sehingga mau berpartisipasi dalam program-program yang diberikan oleh LMDH sehingga masyarakat dapat melunasi hutang kepada rentenir.

Hal tersebut juga dikuatkan oleh pernyataan Bapak Nor Ivansyah selaku KSS PHBM & Binling KPH Saradan :

“ya kalau di desa itu memang kan rentenir lebih berkembang daripada yang lain, karena masyarakat kepepet butuh duit dan sulit dapat pinjaman jadi yang paling cepat ya lari ke rentenir tanpa pikir panjang sama akibatnya. Makanya dengan masuknya koperasi tujuannya untuk memecahkan permasalahan tersebut sehingga rentenir itu sudah tidak jalan lagi. Kalaupun sekarang masih ada yang masih punya hutang di rentenir ya wajar soalnya kan mungkin karena tanggungan sebelumnya itu sudah banyak jadi untuk menyelesaikan dalam waktu beberapa tahun itu agak kesulitan” (wawancara 4 April 2014)

Budaya meminjam uang kepada rentenir di desa masih sangat sering terjadi karena dapat meminjamkan uang dengan cepat dan mudah. Kualitas SDM yang rendah serta kesadaran masyarakat terhadap resiko yang akan ditanggung dapat menjadi faktor yang membuat rentenir mudah masuk dalam lingkungan masyarakat. Masuknya koperasi diharapkan mampu menanggulangi permasalahan tersebut untuk dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga masyarakat dapat melunasi hutang-hutang tersebut dan mencegah masyarakat untuk hutang kepada rentenir atau pemilik 1modal karena pendapatan mereka cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka.

C. Pembahasan

1. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program PHBM sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa Hutan Di Desa Durenan Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun

a. Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program PHBM sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa Hutan di Desa Durenan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terlihat bahwa proses pemberdayaan masyarakat di Desa Durenan telah membuat masyarakat mulai memiliki kemauan untuk memberdayakan dirinya melalui partisipasi terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di LMDH Podang Wilis. Masyarakat sudah mengerti pentingnya hutan dan memahami bagaimana cara untuk memanfaatkan sumberdaya hutan dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Melalui berbagai macam kegiatan dan pelatihan dalam program PHBM yang ada di LMDH Podang Wilis masyarakat akhirnya dapat membangun pola pikir yang inovatif serta lebih produktif dalam pemanfaatan sumberdaya hutan dan potensi yang mereka miliki.

Dari pemaparan penyajian data yang ada, dapat disimpulkan bahwa proses pemberdayaan masyarakat di Desa Durenan telah berjalan dengan baik. Masyarakat, LMDH dan stakeholder bersama-sama menjalankan perannya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif baik melalui kegiatan lahan maupun non lahan. Kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan untuk menjadikan masyarakat desa hutan yang mandiri dan produktif serta

mengajak masyarakat untuk ikut dalam pengelolaan hutan dan melestarikannya serta pemanfaatan sumberdaya hutan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa hutan.

Proses pemberdayaan masyarakat di Desa Durenan diawali dengan proses sosialisasi, tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk mengenalkan kepada masyarakat tentang program PHBM serta kegiatan-kegiatan yang ada di dalam program tersebut. kondisi kualitas SDM masyarakat Desa Durenan masih tergolong rendah, oleh karena itu pihak LMDH sering mengalami kesulitan dalam proses sosialisasi di mana masyarakat sulit untuk diajak untuk bisa memanfaatkan potensi yang ada dalam diri mereka. Munculnya kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh LMDH Podang Wilis tidak secara langsung bisa diserap oleh masyarakat. Ketika suatu kegiatan disosialisasikan terdapat kecenderungan masyarakat enggan melakukannya karena merasa kesulitan dan tidak bisa padahal masih belum mencoba kegiatan tersebut. Namun ketika masyarakat diberikan pendidikan dan pelatihan masyarakat mulai mengerti dan mulai mau melakukan kegiatan-kegiatan produktif tersebut. Selain itu seringkali terdapat pula kecenderungan yang ada di masyarakat bahwa dalam setiap kegiatan-kegiatan yang disosialisasikan oleh LMDH Podang Wilis masyarakat harus melihat contoh dari kegiatan tersebut. ketika kegiatan tersebut berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang menurut masyarakat sangat besar barulah masyarakat mulai mau melakukan kegiatan tersebut. Proses sosialisasi yang dilakukan oleh LMDH Podang Wilis telah berjalan dengan baik namun membutuhkan waktu yang cukup

lama untuk mengajak masyarakat agar mau melakukan kegiatan yang disosialisasikan. Hal ini disebabkan oleh kualitas SDM masyarakat Desa Durenan yang masih tergolong rendah.

Masyarakat juga diberi ruang untuk menyalurkan aspirasinya dan ide kreatif mereka dalam bidang lahan maupun non lahan. Masyarakat bisa mengajukan apa yang bisa mereka lakukan untuk meningkatkan pendapatan mereka dan jika diperlukan modal ataupun pelatihan dapat disediakan oleh KMDH Podang Wilis. Kegiatan *sharing* ini dilakukan melalui kegiatan rapat anggota yang dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan.

Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Durenan berjalan dengan baik dan mencakup berbagai sektor tidak hanya kegiatan berbasis lahan saja tetapi juga usaha produktif. Tema yang diangkat oleh LMDH Podang Wilis dalam pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Durenan adalah “Main Utek” yaitu Masyarakat Inovatif, Usaha Terpadu, dan Ekonomi Kerakyatan dari tema tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui program PHBM yang ada di Desa Durenan ini tidak hanya mencakup pada pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan saja seperti pemanfaatan lahan di bawah tegakan, tetapi juga tetapi juga memanfaatkan potensi yang mereka miliki untuk dijadikan usaha produktif yang akan menunjang sektor perekonomian mereka.

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan setiap kegiatan berlangsung dan setiap akhir kegiatan tersebut. Melalui rapat anggota yang dilakukan setiap bulan juga menjadi kesempatan untuk melakukan diskusi

mengenai evaluasi kegiatan yang sudah dilakukan dalam satu bulan. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dalam setiap kegiatan yang dilakukan melalui rapat rutin anggota setiap dua kali dalam satu bulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa proses pemberdayaan masyarakat di Desa Durenan melalui proses perencanaan, selanjutnya adalah proses pelaksanaan yang didahului oleh sosialisasi sebelum kegiatan dilaksanakan, kemudian tahap yang terakhir adalah evaluasi kegiatan. proses pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Durenan telah mencapai pada fase emansipatoris adalah bahwa proses pemberdayaan berasal rakyat untuk rakyat dengan didukung oleh pemerintah bersama masyarakat. Pada fase emansipatoris ini masyarakat sudah dapat menemukan kekuatan dirinya sehingga dapat dilakukan dalam mengaktualisasikan dirinya. Puncak dari kegiatan proses pemberdayaan masyarakat ini adalah ketika pemberdayaan ini semuanya datang dari keinginan masyarakat sendiri. Pada fase ini masyarakat telah mengenali potensi yang ada di dalam dirinya dan mengerti cara untuk mengembangkannya (Yansen, 2013:137).

Meskipun proses pemberdayaan di Desa Durenan telah mencapai pada fase emansipatoris namun hendaknya tetap ada sosialisasi secara mendalam pada setiap kegiatan-kegiatan baru yang akan diberikan oleh LMDH Podang Wilis. Masyarakat harus tetap didampingi dalam kegiatan yang dilakukan

pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan.

Pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Durenan telah berjalan dengan baik, hal tersebut sesuai dengan teori upaya dalam memberdayakan masyarakat menurut Yansen (2013:159), dapat dilihat dari tiga sisi. *Pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*), dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Hal tersebut ditandai dengan memberikan daya kepada masyarakat sekitar hutan di Desa Durena untuk memanfaatkan sumberdaya hutan melalui pemanfaatan lahan di bawah tegakan serta memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan mengenai potensi apa yang akan mereka kembangkan dan cara mengembangkan potensi tersebut.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*), perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan, serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi semakin berdaya. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan sarana dan prasarana dasar baik fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat di jangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di perdesaan, di mana terkonsentrasi

penduduk yang keberdayaannya amat kurang. Hal ini ditandai dengan adanya pembangunan jalan beton yang dilakukan oleh LMDH Podang Wilis dan penyediaan kendaraan kesehatan secara gratis bagi masyarakat yang akan ke rumah sakit. Pendidikan, pelatihan serta peminjaman modal usaha dan pertanian juga disediakan oleh KMDH Podang Wilis yang saat ini telah berjalan dengan baik.

Ketiga, memberdayakan mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Hal ini ditandai dengan adanya kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta menunjang perekonomian masyarakat sekitar hutan Durenan. Salah satu tujuannya adalah agar masyarakat tidak menjual hasil perkebunan mereka kepada tengkulak atau tidak terjebak kepada sistem gadai yang disepakati dengan rentenir yang tentu saja akan melemahkan perekonomian masyarakat. Seluruh kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Durenan ini mencegah masyarakat untuk masuk pada sistem gadai yang selama ini terjadi dengan cara menunjang perekonomian mereka melalui kegiatan-kegiatan tersebut.

- b. Aktor-aktor yang Terlibat dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program PHBM sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa Hutan di Desa Durenan

Pemberdayaan yang ada di Desa Durenan melibatkan banyak aktor yang berperan di dalamnya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan aktor-aktor yang berperan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa Durenan yaitu : 1) LMDH Podang Wilis, 2) Perum Perhutani (KPH Saradan), 3) Pemerintah Desa Durenan, dan 4) Stakeholder atau Pihak yang Berkepentingan. Aktor-aktor tersebut sangatlah berperan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa Durenan, masing-masing aktor memiliki peran yang berperan yang berbeda-beda.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aktor-aktor yang berperan dalam program PHBM di Desa Durenan telah melakukan perannya dengan baik. Seluruh pihak atau aktor yang terlibat telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan program PHBM di Desa Durenan, aktor-aktor tersebut bekerjasama dengan prinsip kemitraan dengan hasil yang saling menguntungkan. Bentuk kontribusi dan kerjasama yang dilakukan melingkupi berbagai macam bentuk kegiatan seperti permodalan, pertanian, usaha produktif, kesehatan, pendidikan, kesehatan, dan peternakan.

Mekanisme dalam pemberdayaan masyarakat menurut Yansen (2013:175), harus melibatkan segenap potensi yang ada di dalam pemberdayaan masyarakat tersebut. *Pertama*, peranan pemerintah teramat penting. Pemerintah dalam hal ini adalah Pemerintah Desa Durenan yang

telah berperan dalam proses pemberdayaan masyarakat dan membantu dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemberdayaan bersama dengan LMDH Podang Wilis. Bantuan juga didapatkan tidak hanya dari pemerintah desa saja tetapi juga dari dinas-dinas terkait seperti Dinas Kehutanan, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun Dan Transmigrasi Kabupaten Madiun.

Kedua, organisasi-organisasi kemasyarakatan di luar lingkungan masyarakat sendiri seperti LSM yang bersifat lokal maupun nasional. Dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Durenan LSM termasuk dalam aktor yang berkepentingan. LMDH Podang Wilis bekerjasama dengan LSM Lesehan dalam bidang pengembangan Ilmu Teknologi yaitu memberikan kursus komputer gratis kepada anak-anak di tingkat "PAUD".

Ketiga, Lembaga yang tumbuh dari dan di dalam masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini LMDH Podang Wilis merupakan lembaga yang memayungi masyarakat desa hutan. LMDH berperan sebagai pihak yang mengadakan pelatihan dan kegiatan-kegiatan pemberdayaan untuk menggali potensi yang dimiliki oleh masyarakat untuk dikembangkan sehingga tercipta masyarakat yang mandiri dan pembangunan berkelanjutan.

Keempat, koperasi dapat menjadi wahana yang efektif bagi upaya pemberdayaan masyarakat untuk menunjang upaya meningkatkan kegiatan usaha para anggota yang dilakukan secara bersama. Pemberdayaan masyarakat di Desa Durenan memiliki lembaga sebagai payung bagi masyarakat desa hutan Durenan yang bernama LMDH Podang Wilis yang memiliki koperasi yang bernama Koperasi Masyarakat desa Hutan (KMDH)

Podang Wilis. Seluruh kegiatan pemberdayaan yang ada di LMDH Podang Wilis dibiayai oleh KMDH Podang Wilis termasuk peminjaman dana dan bahan-bahan pertanian dan peternakan disediakan oleh KMDH Podang Wilis termasuk seluruh kegiatan-kegiatan sosial seperti pembangunan jalan beton dan penyediaan kendaraan kesehatan dan lain-lain yang berkaitan dengan kegiatan yang ada di LMDH Podang Wilis.

Kelima, pendamping bertugas menyertai proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok masyarakat sebagai fasilitator, komunikator ataupun dinamisator. Pendamping dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Durenan adalah pihak Perum Perhutani yang berperan sebagai pendamping dalam seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di LMDH Podang Wilis. Pihak Perhutani dalam hal ini KPH Saradan bersama dengan LMDH Podang Wilis menyusun rencana strategis bersama-sama serta memberikan pelatihan-pelatihan yang diperlukan kepada LMDH dalam melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang akan dilakukan.

Keenam, pemberdayaan masyarakat harus dicerminkan dalam proses perencanaan pembangunan, sebagai aliran dari bawah keatas. Pemberdayaan masyarakat di Desa Durenan dikoordinasikan dengan baik, hal ini ditandai dengan komunikasi sosial yang dibangun melalui rapat anggota yang dilakukan secara rutin sebanyak dua kali dalam satu bulan. Masyarakat dibebaskan untuk memilih sendiri bentuk kegiatan yang mereka inginkan dan dibantu oleh KMDH Podang Wilis untuk permodalan dan pelatihan kegiatan tersebut. LMDH Podang Wilis juga terdiri dari beberapa kelompok kerja yang

membawahi banyak sekali anggotanya yang bertugas untuk mengkoordinasi anggotanya untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tentang kegiatan yang akan mereka lakukan.

Ketujuh, keikutsertaan masyarakat yang lebih mampu, khususnya dunia usaha dan swasta. Peran pihak swasta atau pemilik modal juga berperan dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Durenan meliputi masalah permodalan. Salah satu contoh pada tahun 2012 LMDH Podang Wilis melakukan kerjasama dengan Bank BNI untuk kegiatan simpan pinjam dengan pinjaman modal sebesar Rp. 500.000.000,-.

c. Capaian Hasil dari Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program PHBM sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa Hutan di Desa Durenan

Program PHBM memberikan kesempatan bagi Masyarakat Desa Hutan untuk mampu menggali potensinya dan berpartisipasi untuk memberdayakan dirinya. Berdirinya LMDH Podang Wilis dan KMDH Podang Wilis telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi masyarakat desa hutan melalui program PHBM dan kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya. Kegiatan-kegiatan tersebut memberikan tambahan penghasilan kepada masyarakat desa hutan di Desa Durenan melalui berbagai sektor, dari hasil wawancara bahwa kegiatan kegiatan yang ada di dalam LMDH Podang Wilis meliputi :

Tabel 15
Kegiatan LMDH Podang Wilis Berbasis Lahan Maupun Non Lahan

No	Jenis Komoditas	Jenis Kegiatan
1	Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mangga 2. Durian 3. Roshella 4. Alpokat 5. Jengkol
2	Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Padi 2. Jagung 3. Kedelai 4. Kacang Tanah 5. Kacang Panjang 6. Singkong
3	Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bebek 2. Kambing
4	Usaha Produktif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keripik Singkong 2. Sirup Roshella 3. Sirup Buah 4. Kebun Bibit & Kebun Sayur (Rumah Sayur Hijau) 5. Budidaya Sengon Laut 6. Budidaya Tanaman Porang Seluas 25 Ha 7. Tepung Mocaf

Sumber : Analisis Peneliti

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui program PHBM di Desa Durenan telah memenuhi beberapa langkah strategis yang harus ditempuh untuk mengembangkan ekonomi rakyat melalui pemberdayaan menurut Yansen (2013:187) yaitu : *Pertama*, peningkatan akses ke dalam aset produksi. Bagi masyarakat petani yang masih dominan dalam ekonomi rakyat, modal produktif yang pertama adalah tanah. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan pemberdayaan pemanfaatan lahan di bawah tegakan. Kegiatan ini merupakan bentuk kerjasama LMDH dengan Perhutani di mana masyarakat diberi lahan untuk dapat dimanfaatkan dan ditanami dengan jenis tanaman

yang sesuai dengan kondisi lahan. Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan, bahwa lahan yang dimiliki oleh Desa Durenan merupakan lahan perkebunan yang hasil perkebunannya hanya bisa di panen tiap tahun. Melalui kegiatan pemanfaatan lahan di bawah tegakan ini masyarakat dapat menanam lahan tersebut dengan tanaman pertanian yang bisa lebih cepat panen dan memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat desa hutan di Desa Durenan.

Kedua, memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat. Wadah koperasi amat cocok untuk kegiatan tersebut, meskipun tidak satu-satunya. Selain menyediakan lahan untuk dapat ditanami oleh masyarakat Desa Durenan, LMDH Podang Wilis melalui KMDH Podang Wilis juga menyediakan modal usaha dan bahan-bahan pertanian dengan harga yang murah yaitu tidak lebih dari 2% dari harga eceran sehingga masyarakat dapat diuntungkan. Selain dalam bidang pertanian dan usaha produktif masyarakat juga di ajak untuk melakukan kegiatan ternak melalui peminjaman hewan ternak untuk dibudidayakan. Kegiatan-kegiatan tersebut selain memberdayakan masyarakat untuk mendapatkan tambahan pendapatan tetapi juga memberikan keuntungan bagi koperasi. Keuntungan tersebut disalurkan pula melalui berbagai sektor seperti pendidikan komputer gratis di tingkat “PAUD”, pembangunan desa dengan membangun jalan beton, serta menyediakan transportasi bagi masyarakat miskin untuk akses ke rumah sakit secara gratis. Dampak pemberdayaan masyarakat melalui program PHBM telah memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait tidak hanya bagi

kelestarian hutanm saja namun bagi masyarakat desa hutan dan pembangunan di lingkungan Desa Durenan.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program PHBM sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa Hutan Di Desa Durenan Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun

Berdasarkan hasil penelitian dan penyajian data, telah diketahui bahwa dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di melalui program PHBM. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat mealui program PHBM dan terdapat pula faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan pemberdayaan masyarakat mealui program PHBM di Desa Durenan seperti berikut ini:

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam pelaksanaan pemebrdayaan masyarakat melalui program PHBM di Desa Durenan adalah :

1) Kekompakan antara LMDH Podang Wilis dan Masyarakat Desa Durenan

Komunikasi sosial yang telah terbangun melalui rapat rutin dan *sharing* membuat seluruh kegiatan-kegiatan baik lahan maupun non lahan dapat dijalankan dengan lancar. Masyarakat sudah mulai mengerti bagaimana cara untuk mendapatkan

penghasilan tambahan dan berpartisipasi dalam pengelolaan lahan serta pemanfaatan sumberdaya hutan.

2) Potensi sumberdaya alam di Desa Durenan yang sangat melimpah

Desa Durenan merupakan daerah pegunungan, walaupun kondisi tanahnya kurang cocok untuk dijadikan sawah namun lahanya sangat subur untuk ditanami tanaman pertanian dan perkebunan. Hal tersebut terbukti bahwa Desa Durenan merupakan daerah penghasil singkong terbesar di Kabupaten Madiun.

3) Stakeholder yang sangat berperan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Durenan

Peran Stakeholder atau pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa Durenan sangat baik, para stakeholder tertarik untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan yang ada di Desa Durenan. Potensi Desa Durenan yang sangat melimpah serta koordinasi antara anggota dan lembaga yang dinilai sangat baik menjadi pemicu terhadap ketertarikan para stakeholder untuk berpartisipasi.

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat di Desa Durenan dipengaruhi oleh besarnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan tersebut. hal ini seperti beberapa kebijaksanaan yang ditempuh untuk meningkatkan peran serta masyarakat (Adisasmita, 2013:71) yaitu : 1) menciptakan iklim yang mendorong prakarsa dan peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam

berbagai kegiatan pembangunan; 2) peningkatan kualitas dan kemampuan masyarakat dalam berbagai bidang kegiatan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna; dan 3) peningkatan hubungan antar kelompok. Kebijakan-kebijaksanaan tersebut juga telah mempengaruhi dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa Durenan dan telah berjalan dengan baik.

b. Faktor Penghambat

Seluruh keberhasilan yang telah dicapai melalui program PHBM tentu bukan tanpa ada hambatan, terdapat beberapa kendala yang menjadi penghambat dalam keberhasilan pelaksanaan program PHBM di Desa Durenan. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan program PHBM di Desa Durenan adalah :

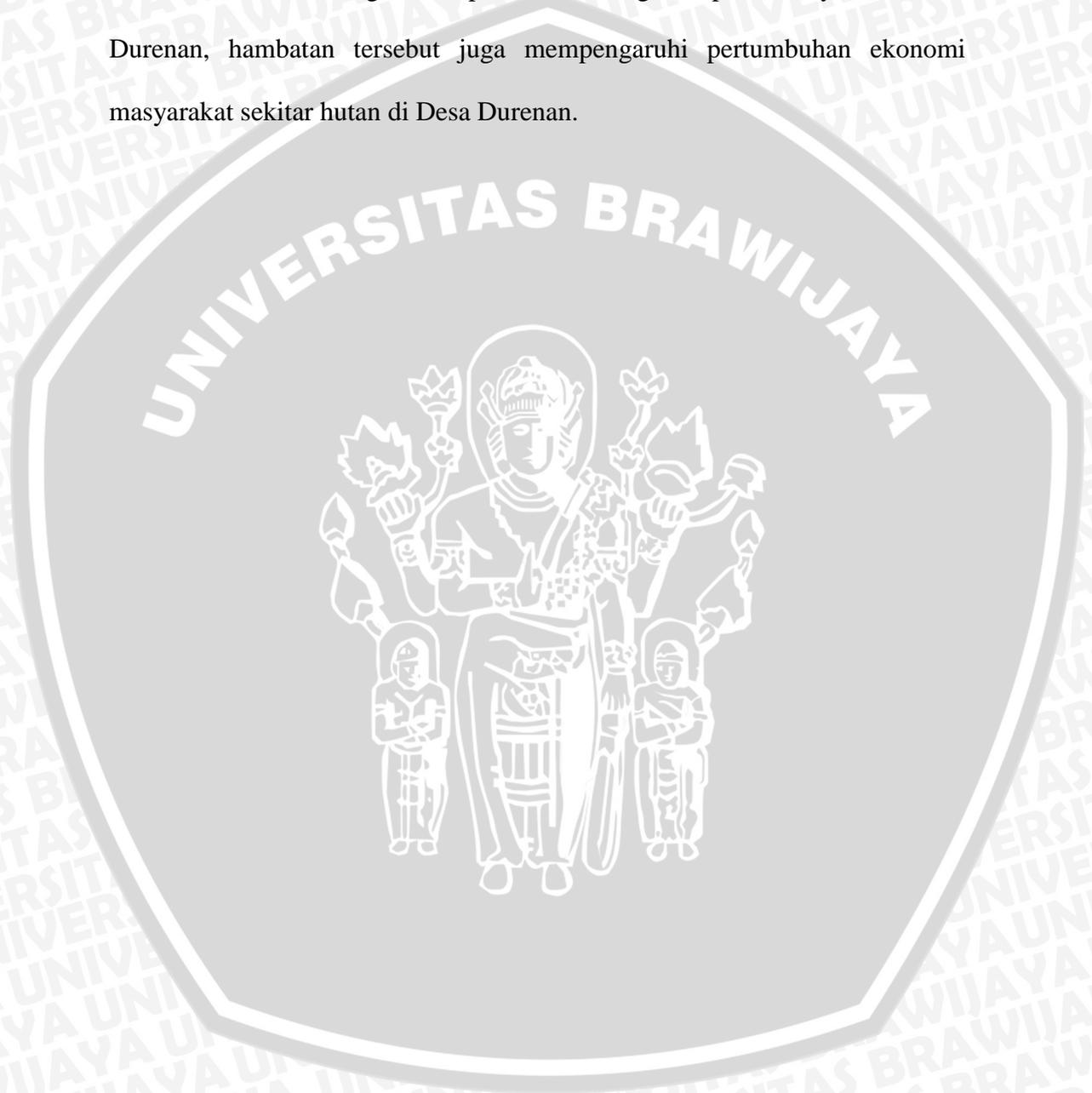
- 1) Rendahnya kualitas SDM masyarakat Desa Durenan sehingga kesadaran masyarakat untuk memberdayakan dirinya masih rendah. Hal tersebut dapat diatasi dengan membimbing masyarakat agar mau mengembangkan dirinya, melalui sosialisasi yang dilakukan secara mendalam akan membuat masyarakat memahami cara memberdayakan dirinya dan mengembangkan potensi yang mereka miliki.
- 2) Masuknya rentenir atau pemilik modal yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Masyarakat pedesaan yang cenderung memiliki kebiasaan meminjam kepada rentenir dengan sistem gadai yang sangat merugikan masyarakat. Seluruh hasil

panen perkebunan masyarakat di ambil oleh rentenir atau pemilik modal sebelum masyarakat dapat mengembalikan hutang yang mereka pinjam. Sistem gadai yang disepakati oleh masyarakat ini sangat merugikan masyarakat tersebut karena masyarakat tidak dapat memperoleh hasil panen mereka sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Meskipun saat ini sudah banyak masyarakat yang sudah dapat melunasi hutang mereka namun masih ada sebagian masyarakat yang masih memiliki tanggungan hutang kepada rentenir.

Kedua faktor penghambat tersebut sesuai dengan hambatan utama yang menyebabkan timbulnya perangkap kemiskinan bagi masyarakat menurut Yansen (2013:113) yaitu : Pertama, Hambatan Sumberdaya Manusia. Dewasa ini dalam era *knowledge based-economy*, kekayaan suatu bangsa tidak lagi di ukur seberapa besar potensi sumberdaya alamnya tetapi sumberdaya manusia. Apabila suatu Negara memiliki potensi sumberdaya alam yang besar namun kapabilitas sumberdaya manusia tidak ditingkatkan maka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam yang tersedia juga tidak dapat dilakukan dengan baik.

Kedua, hambatan struktural, yaitu kondisi kemiskinan yang diakibatkan oleh kebijakan dan tatanan ekonomi yang tidak berpihak kepada orang miskin. Hal tersebut seperti yang terjadi di Desa Durenan dengan budaya meminjam kepada rentenir dan sistem gadai yang sangat merugikan masyarakat. Sementara itu tidak ada aturan dan kebijakan yang mampu

melemahkan dominasi dari rentenir dalam sistem gadai tersebut sehingga yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Hambatan-hambatan tersebut menghambat pelaksanaan kegiatan pemberdayaan di Desa Durenan, hambatan tersebut juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar hutan di Desa Durenan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dan hasil analisis pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program PHBM sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa Hutan di Desa Durenan, mencakup tentang :

- a. Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program PHBM sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa Hutan di Desa Durenan

Proses pemberdayaan masyarakat di Desa Durenan telah berjalan dengan baik, masyarakat sudah mulai memiliki kemauan untuk memberdayakan dirinya dan mengembangkan potensi yang mereka miliki. Melalui kegiatan-kegiatan yang ada di LMDH Podang Wilis baik melalui kegiatan lahan maupun non lahan masyarakat telah memiliki kegiatan yang meningkatkan pendapatan mereka. Berdasarkan proses pemberdayaan yang telah dilakukan oleh LMDH Podang Wilis, tahap sosialisasi dinilai merupakan tahap yang paling sulit dilakukan karena memerlukan waktu yang cukup lama untuk suatu kegiatan dapat diterima dan

dijalankan dengan baik oleh masyarakat. Hal tersebut dipengaruhi oleh tingkat SDM masyarakat yang masih tergolong rendah.

- b. Aktor-aktor yang Terlibat dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program PHBM sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa Hutan di Desa Durenan

Aktor-aktor yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat melalui program PHBM di Desa Durenan terdiri dari Perum Perhutani, LMDH Podang Wilis, Pemerintah Desa Durenan, dan pihak yang berkepentingan atau stakeholder. Aktor-aktor tersebut telah bersinergi dengan sangat baik dan telah berkontribusi dalam tujuan pemberdayaan masyarakat melalui program PHBM melalui kegiatan-kegiatan yang ada baik lahan maupun non lahan.

- c. Capaian Hasil dari Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program PHBM sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa Hutan di Desa Durenan

Hasil dari pemberdayaan masyarakat melalui program PHBM berdampak sangat baik bagi masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Adapun hasil-hasil positif yang diraih dalam pemberdayaan ini adalah :

- 1) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional di mana masyarakatlah yang berperan dalam memberdayakan dirinya,

karena masyarakat sendirilah yang mengetahui apa saja yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

- 2) Meningkatnya kemandirian dan keberdayaan masyarakat. Melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan baik berupa pemberdayaan berbasis lahan maupun non lahan membuat masyarakat mampu menggali potensinya dan mengembangkan diri sehingga terciptalah masyarakat yang mandiri dan pembangunan berkelanjutan.
- 3) Meningkatnya pendapatan masyarakat. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang ada di Desa Durenan juga berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat di mana melalui kegiatan-kegiatan tersebut masyarakat diberdayakan untuk lebih produktif. Masyarakat juga diberikan pelatihan dan permodalan untuk membantu masyarakat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut.
- 4) Pembangunan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan masyarakat. Pembangunan sarana dan prasarana yang telah dilakukan berupa pembangunan jalan beton dan penyediaan kendaraan bagi masyarakat miskin secara gratis untuk akses ke rumah sakit yang jaraknya cukup jauh.
- 5) Kelestarian hutan yang tetap terjaga, hal tersebut dikarenakan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengelolaan hutan, seperti pemanfaatan lahan di bawah tegakan masyarakat ikut menjaga

hutan karena memiliki lahan garapan di hutan tersebut. Kemudian angka pencurian kayu yang dapat di tekan karena pendapatan masyarakat dan kebutuhan sehari-hari telah tercukupi.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program PHBM sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa Hutan di Desa Durenan

Beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui program PHBM di Desa Durenan teridentifikasi oleh penulis sebagai berikut :

a. Faktor Pendukung

Faktor yang menjadi pendukung keberhasilan pemberdayaan masyarakat melalui program PHBM di Desa Durenan adalah :

- 1) Kekompakan antara LMDH Podang Wilis dan Masyarakat Desa Durenan
- 2) Potensi sumberdaya alam di Desa Durenan yang sangat melimpah
- 3) Stakeholder yang sangat berperan dengan baik dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Durenan

b. Faktor Penghambat

Faktor yang menjadi penghambat dalam keberhasilan pelaksanaan program PHBM di Desa Durenan adalah :

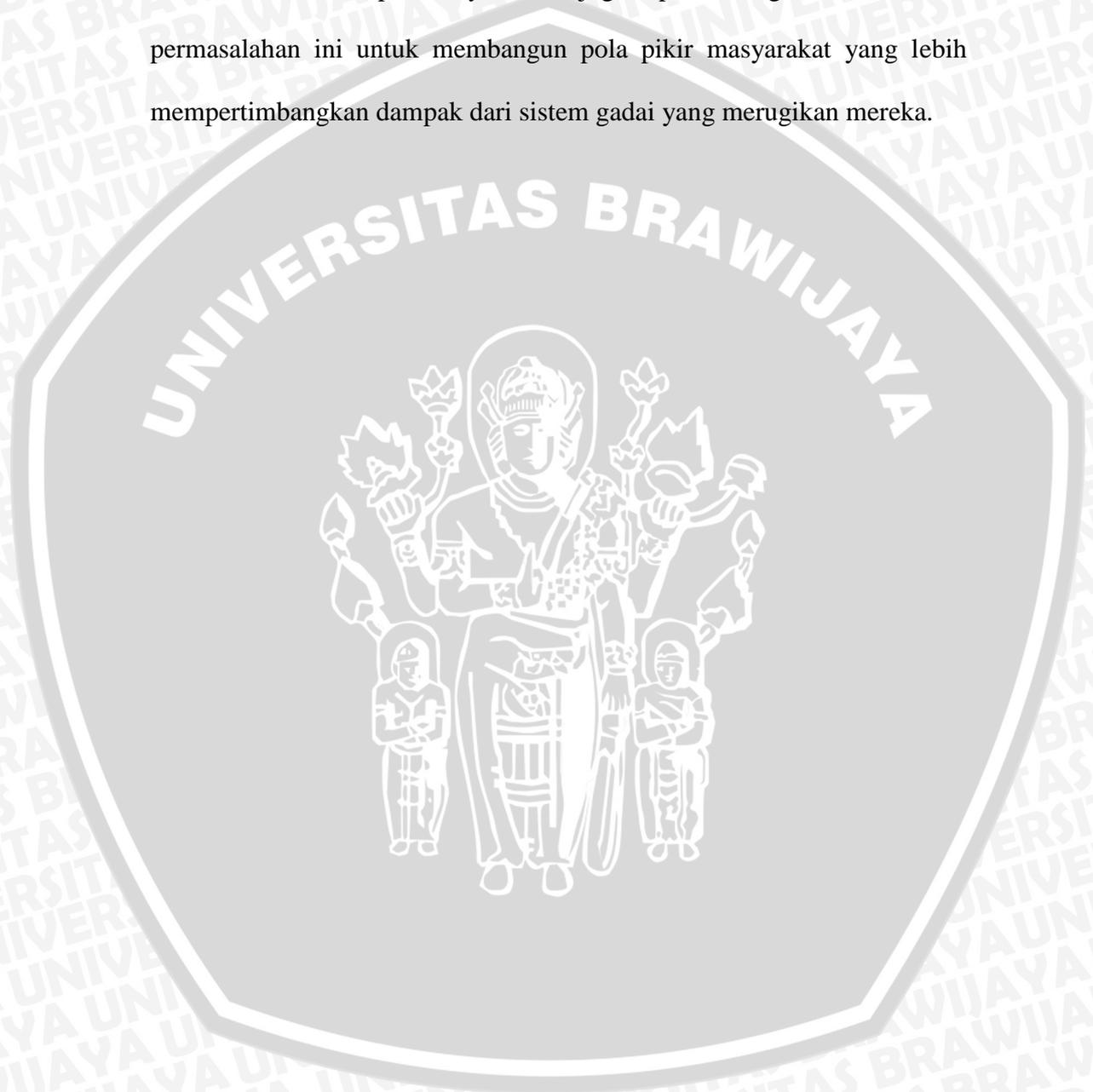
- 1) Rendahnya kualitas SDM masyarakat Desa Durenan sehingga kesadaran masyarakat untuk memberdayakan dirinya masih rendah.
- 2) Masuknya rentenir atau pemilik modal yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan yang telah disusun, maka saran yang dapat diberikan adalah :

- 1) Perlu adanya sosialisasi yang lebih mendalam mengingat sosialisasi yang telah dilakukan sulit diterima dengan cepat oleh masyarakat. Perlunya pendidikan dan pelatihan yang menggunakan metode sesuai dengan tingkat kedewasaan masyarakat sehingga mudah untuk diterima mengingat rendahnya kualitas SDM masyarakat.
- 2) Informasi tentang program PHBM hendaknya lebih sering digalakkan, karena menurut pengalaman pengamatan penulis di lapangan masih terdapat beberapa masyarakat yang kurang memahami tentang program PHBM. Beberapa masyarakat masih ada yang kurang memahami bahwa kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan itu berasal dari program PHBM.

- 3) Perlu adanya tindakan khusus untuk mengatasi ulah rentenir atau pemilik modal yang menggunakan sistem gadai yang merugikan masyarakat. Sosialisasi terhadap masyarakat juga perlu digalakkan dalam permasalahan ini untuk membangun pola pikir masyarakat yang lebih mempertimbangkan dampak dari sistem gadai yang merugikan mereka.



DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Pembangunan Perdesaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Arief, Arifin. 2007. *Hutan dan Kehutanan*. Yogyakarta: Konisius
- Awang, S, Afri. 2008. *Panduan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan*. Jakarta: Harapan Prima
- Budiono, Arief. 2008. Tesis dengan judul : kebijakan Perum Perhutani KPH Saradan dalam pengelolaan hutan berbasis partisipasi masyarakat melalui PHBM. Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret : Surakarta
- Hanani, *et al.*, 2003. *Strategi Pembangunan Pertanian*. Bantul: Pustaka Jogja Mandiri
- Hendroyono, Bambang. 20013. *Permasalahan Pengelolaan Hutan di Indonesia Harus Dioptimalkan*, diakses pada Tanggal 4 Maret 2014 dari <http://kampus.okezone.com/read/2013/04/28.....>
- Indriyanto. 2008. *Pengantar Budi Daya Hutan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Lexy J. Moleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kumulatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Mubyarto. 1996. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa di Indonesi*. Yogyakarta: Aditya Media
- Perum Perhutani. 2014. *Sejarah: Perum Perhutani*, diakses pada tanggal 4 Oktober 2013 dari www.perumperhutani.com
- _____. 2010. *Petunjuk pelaksanaan PHBM*. Surabaya : Biro Kelola SDH
- Peryansyah, Aldy. 2013. *Laju Kerusakan Hutan di Indonesia Duduki Peringkat 3 Besar*. Unisi Radio Jogja : Campus Reporting News, diakses pada Tanggal 15 Maret 2014 dari <http://unisifm.com/%EF%BB%BF%laju-kerusakan-hutan-.....>
- Republik Indonesia. *Undang–Undang Nomor 41 Tahun 1999* tentang Kehutanan

_____. *Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 tentang sumberdaya alam Indonesia*

_____. *Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor: 682/KPTS/DIR/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat*

Siagian, SP. 1985. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara

_____. 1983. *Pokok-Pokok Pembangunan Masyarakat Desa*. Bandung: IKAPI

Soemarno. 2006. *Model Pengelolaan Sumberdaya Hutan Untuk Pengembangan Wilayah & Pemberdayaan Masyarakat*. Malang: Agritek YPN

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Suhendra, K. 2006. *Peran birokrasi dalam pemberdayaan masyarakat*. Bandung: Alfabeta

Sumodiningrat, G. 2006. *Kemiskinan bukan kepasrahan (strategic management)*. Yogyakarta

Tjokroamidjojo, B. 1994. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES

Yansen, TP. 2013. *Gerakan Desa Membangun*. Malang: Danar Wijaya

Lampiran 1

INTERVIEW GUIDE

Ketua LMDH Podang Wilis:

1. Apasaja kegiatan pemberdayaan yang ada di Desa Durenan?
2. Apasaja kendala dalam proses pemberdayaan di Desa Durenan?
3. Apa komoditi utama Desa Durenan
4. Bagaimana dampak dari pemberdayaan masyarakat terhadap masyarakat desa hutan Durenan?
5. Bagaimana peran pemerintah atau stakeholder terhadap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa Durenan?
6. Bagaimana prose pemberdayaan masyarakat di Desa Durenan?

Masyarakat Desa Durenan:

1. Bantuan apa saja yang anda dapatkan dari Koperasi?
2. Berapa luas lahan yang anda dapatkan?
3. Bagaimana dampak dari bantuan yang anda dapatkan dari LMDH Podang Wilis?

CURRICULUM VITAE

Nama : JESTIKA ORLANDA WIYONOPUTRI

NIM : 105030101111070

Tempat, Tanggal Lahir : MADIUN, 13 MARET 1992

Pendidikan : 1. TK Dharma Wanita Sugihwaras Tamat Tahun 1998

2. SDN Sugihwaras 06 Tamat Tahun 2004

3. SMPN 1 Mejayan Tamat Tahun 2007

4. SMAN 1 Mejayan Tamat Tahun 2010

5. Universitas Brawijaya Tamat Tahun 2014

